

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Keanggotaan Komite

Komite Audit

Komite Pemantauan
Risiko

Komite Remunerasi
dan Nominasi

Komite Manajemen
Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	34
Tanggal akta pendirian	23-12-2014
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	6
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	06-05-2025
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-AH.01.09-0230680
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	09-05-2025
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	27-03-2015
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Perbankan
Tempat kedudukan	Kabupaten Bandung

0

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Rekening	Jumlah
---------------	--------

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga						
Penempatan pada bank lain						
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR						
b. Kepada Bank Umum						
c. Kepada non bank - pihak terkait						
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait						
Penyertaan Modal						
Jumlah Aset Produktif						

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
----------------	-----------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Secara umum, faktor penyebab utama dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penurunan kemampuan bayar debitur, khususnya pada sektor perdagangan dan UMKM, yang terdampak pelemahan daya beli masyarakat dan fluktuasi harga komoditas lokal 2. Kualitas analisis kredit yang belum optimal pada periode ekspansi sebelumnya, terutama dalam aspek penilaian cash flow dan mitigasi risiko sektor usaha, sehingga meningkatkan risiko inheren kredit 3. Konsentrasi portofolio kredit pada segmen tertentu yang memiliki volatilitas tinggi, sehingga ketika terjadi tekanan ekonomi, berdampak langsung terhadap peningkatan kolektibilitas 4. Keterlambatan dalam tindakan penanganan dini (early warning), sehingga beberapa kredit yang awalnya berada pada kategori Dalam Perhatian Khusus tidak segera ditangani dan mengalami penurunan kualitas menjadi Kurang Lancar hingga Macet 5. Kendala dalam proses eksekusi agunan, termasuk aspek legalitas dan kondisi pasar, yang menyebabkan recovery kredit bermasalah belum optimal.
Langkah Penyelesaian	Dalam rangka menurunkan tingkat NPL dan memperbaiki kualitas aset produktif, manajemen telah dan akan terus melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Penagihan intensif dan terstruktur, melalui monitoring harian atas debitur bermasalah serta penetapan target recovery yang jelas pada masing-masing account officer. 2. Restrukturisasi kredit secara selektif, sesuai ketentuan POJK yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prospek usaha dan kemampuan bayar debitur guna menurunkan tekanan NPL secara bertahap. 3. Percepatan penyelesaian melalui agunan, termasuk penjualan agunan secara sukarela (AYDA) maupun melalui lelang dengan KPKNL, untuk meningkatkan recovery rate. 4. Penguatan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti konsultan hukum, kejaksaan, dan pengadilan, guna mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah yang memiliki kendala hukum. 5. Penerapan early warning system yang lebih ketat, termasuk pemantauan kolektibilitas secara berkala dan penetapan trigger penanganan lebih dini pada kredit berisiko. Perbaikan kualitas underwriting, dengan penajaman analisis sektor ekonomi, cash flow debitur, serta penyesuaian limit exposure untuk mengendalikan risiko konsentrasi.

0

**PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN
PERUBAHAN PENTING LAIN**

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : 2025

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

Nihil

B. Perubahan Penting Lainnya

Nihil

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : 2025

Strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

Peningkatan market share Dana Pihak Ketiga (DPK) dilakukan melalui strategi perluasan segmentasi pasar serta penguatan kebijakan penghimpunan dana. Upaya ini mencakup peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat, serta evaluasi dan inovasi produk funding agar lebih kompetitif dan bernilai tambah. Selain itu, bank mendorong peningkatan jumlah rekening (number of account), menerapkan bauran pemasaran yang efektif (produk, harga, tempat, promosi), serta mengoptimalkan media promosi. Daya tarik produk juga ditingkatkan melalui setoran awal ringan, bebas biaya administrasi, dan kemudahan menabung, termasuk pengembangan program payroll seperti Non-ASN, perangkat desa, dan karyawan pabrik.

Sementara itu, peningkatan kualitas kredit difokuskan pada ekspansi yang tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan manajemen risiko yang kuat. Strategi ini meliputi penguatan analisis kredit, penyesuaian suku bunga secara berkala sesuai kebijakan regulator, serta peningkatan penyaluran kredit ke sektor produktif khususnya UMKM. Bank juga memperluas skim kredit berbasis pendapatan tetap dengan dukungan kerja sama (MoU) dengan berbagai instansi, serta mengoptimalkan promosi produk lending. Di sisi pengendalian risiko, dilakukan penagihan intensif terhadap kredit bermasalah, restrukturisasi kredit, penyempurnaan regulasi internal, serta percepatan penyelesaian klaim melalui koordinasi dengan pihak asuransi.



Bank Kerta Raharja

Laporan Tata Kelola (GCG) Tahun 2025

Jalan Raya Soreang No. 15 Soreang
Kabupaten Bandung 40912

 (022) 589 3334  bprkertaraharja_official www.bankkertaraharja.co.id

Bersama Kita Bangkit



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



BPR

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi : Semester II Tahun 2025

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	Nilai 3 (Cukup Memadai)
4	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	Nilai 2 (Memadai)
5	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	Nilai 2 (Memadai)
10	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Faktor 12: Rencana bisnis	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

PT BPR Kerta Raharja Perseroda telah memiliki *Governance Structure* yang baik dalam lingkup penerapan tata kelola baik dari segi komposisi dan pemenuhan persyaratan anggota Direksi, Komisaris maupun pembentukan Komite di tingkat Dewan Komisaris. Selain itu, Pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi juga telah ditunjang dengan adanya pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Lebih lanjut, PT BPR Kerta Raharja Perserodajuga secara aktif melakukan tindak lanjut atas kewajiban penyelarasan organisasi dalam rangka penerapan kewajiban Strategi Anti Fraud, Pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, transparansi laporan keuangan dan seluruh ketentuan lainnya berkaitan dengan penerapan tata kelola di BPR berpedoman kepada POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai sudah terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komisaris pada BPR dinilai belum terpenuhi secara keseluruhan
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR sebagian besar tergolong terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa penguatan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik.
7. Penerapan fungsi audit intern sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan.
8. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara baik.
9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai terpenuhi secara baik.
10. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik.
11. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai terpenuhi secara baik.
12. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR BPR tergolong terpenuhi secara baik.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai sudah memadai.
3. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah kurang memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR dinilai memadai.
5. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
7. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR adalah memadai.
8. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai memadai.
9. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
10. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
11. Implementasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
12. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.

Faktor Negatif

Berdasarkan penilaian atas implementasi organisasi perusahaan semester II tahun 2025, penguatan struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola secara berkelanjutan kedepan antara lain terdapat pada Implementasi Komite Remunerasi dan Nominasi di tingkat Dewan Komisaris secara berkelanjutan, hal mana merupakan kewajiban baru berdasarkan POJK 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR. Saat ini, BPR telah melakukan langkah awal untuk mempersiapkan struktur organisasi Komite dimaksud. Namun demikian, implementasi komite secara efektif akan sepenuhnya terlaksana setelah pemenuhan struktur Dewan Komisaris, khususnya penunjukan Komisaris Independen, yang masih dalam proses pengajuan ke OJK.

Soreang, 15 Januari 2026

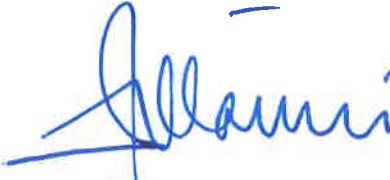
PT BPR Kerta Raharja Persero

Disiapkan Oleh,



Bank Kerta Raharja
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERO
Kantor Pusat Non Operasional
Hendar Cahyadi
Direktur Utama

Diketahui Oleh,


Idat Mustari Sutarya
Komisaris Utama


Bank Kerta Raharja
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERO
Dewan Komisaris


Firman Budiawan
Komisaris

KERTAS KERJA II.

SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

1001. Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0101 Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR telah mengimplementasikan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0102 Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0101 Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kode P0102 Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0103 Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dengan penilaian baik.
Kode P0104 Memastikan	BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dinilai baik.
Kode P0105 Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR dinilai baik.
Kode H0101 Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Kode H0102 Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan pencapaian baik.
Kode H0103 Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR	Penilaian terhadap indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	
Kode H0104 Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR dinilai baik.
Kode F0101 Faktor Positif	1.BPR telah mengimplementasikan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 2.Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F0102 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0103 Faktor Positif	1.Implementasi indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. Adapun BPR juga memiliki mission statement, motto yang didukung dengan adanya penetapan roadmap arah pengembangan BPR sebagai dasar penyampaian arah pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris 2.Indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik. Lebih lanjut, pemantauan sebagaimana dimaksud diimplementasikan baik melalui penyelenggaraan Komite di tingkat Dewan Komisaris secara berkelanjutan maupun secara langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan Rapat rutin sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja berlaku 3.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	permodalan atau dukungan pengembangan lain, dengan penilaian baik. 4.BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR dinilai baik.
Kode F0104 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0105 Faktor Positif	1.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan pencapaian baik. 3.Penilaian terhadap indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik. 4.Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR dinilai baik.
Kode F0106 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0107 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1002. Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0201 Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Kode S0202 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen BPR telah menilai bahwa Indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode S0203 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode S0204 Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0205 Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif	Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	
Kode S0206 Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0207 Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Penilaian terhadap indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode S0208 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0209 Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	dengan ketentuan, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode P0201 Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, dinilai baik.
Kode P0202 Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, BPR tergolong baik.
Kode P0203 Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan penilaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	
Kode P0204 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.
Kode P0205 Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Implementasi indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode P0206 Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, BPR tergolong baik.
Kode P0207 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	
Kode P0208 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik.
Kode P0209 Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Penilaian terhadap indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode P0210 Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan	Indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, pada BPR saat ini dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	
Kode P0211 Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode P0212 Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, pada BPR dinilai baik.
Kode P0213 Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode H0201 Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode H0202 Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode H0203 Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode H0204 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dengan penilaian baik.
Kode H0205 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan baik.
Kode H0206 Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
Kode F0201 Faktor Positif	1.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. 2.Indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 4.Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dinilai telah terpenuhi.
Kode F0202 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0203 Faktor Positif	1.Indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, dinilai baik. 2.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, BPR tergolong baik. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan penilaian baik. 4.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	5.Implementasi indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, di BPR menunjukkan kondisi baik. 6.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, BPR tergolong baik. 7.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan pencapaian baik.
Kode F0204 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0205 Faktor Positif	1.Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2.Indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dinilai baik. 3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik. BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dengan penilaian baik. 5.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai baik.
Kode F0206 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0207 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1003. Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0301 Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang dan Komisaris Independen masih dalam proses pengajuan ke OJK.
Kode S0302 Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang bertempat tinggal di mana lokasi tempat kedudukan BPR berada serta 1 (satu) lainnya berdomisili di Provinsi Jawa Barat.
Kode S0303 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
Kode S0304 Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode S0305 Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode S0306 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0307 Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0308 Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi	Indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan Dewan Komisaris	
Kode P0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dinilai baik.
Kode P0302 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dinilai baik.
Kode P0303 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	
Kode P0304 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam menindaklanjuti hal tersebut juga didukung oleh implementasi Komite pada tingkat Dewan Komisaris.
Kode P0305 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, BPR tergolong baik.
Kode P0306 Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara	Indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, pada BPR indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
konsisten	
Kode P0307 Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai baik.
Kode P0308 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.
Kode P0309 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik.
Kode P0310 Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas	BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	pengawasan Dewan Komisaris, yang dinilai baik.
Kode P0311 Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode P0312 Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.
Kode P0313 Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Implementasi indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode H0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, BPR tergolong baik.
Kode H0302 Hasil rapat Dewan	Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, pada BPR indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dinilai baik.
Kode H0303 Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Penilaian terhadap indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode H0304 Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.
Kode H0305 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik.
Kode F0301	1.BPR memiliki sekurang- kurangnya 1 anggota Dewan Komisaris yang

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Faktor Positif	bertempat tinggal di mana lokasi tempat kedudukan BPR berada serta 1 (satu) lainnya berdomisili di Provinsi Jawa Barat. 2.Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 3.Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 4.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 5.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dengan penilaian telah terpenuhi. 6.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F0302 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0303 Faktor Positif	1.BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dinilai baik. 2.BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dinilai baik. 3.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 4. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam menindaklanjuti hal tersebut juga didukung oleh implementasi Komite pada tingkat Dewan Komisaris. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, BPR tergolong baik. 6. Indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, pada BPR indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, dinilai baik. 7. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai baik. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik. 9. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik. 10. BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dinilai baik. 11. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik. 12. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	Implementasi indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode F0304 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0305 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, BPR tergolong baik. 2.Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dinilai baik. 3.Penilaian terhadap indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, yang dimiliki BPR adalah baik. 4.BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik.
Kode F0306 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0307 Nilai Faktor	3 (Cukup Memadai)

1004. Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0401 BPR telah memiliki Komite Direksi dan	Indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0402 BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0401 Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode P0402 Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	BPR belum membentuk Komite Audit akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode P0403 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan	BPR belum membentuk Komite Pemantau Risiko akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
fungsi manajemen risiko	
Kode P0404 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite remunerasi dan nominasi belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, BPR tergolong cukup baik.
Kode P0405 Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode P0406 Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode H0401 Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan	Implementasi indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	
Kode H0402 Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode H0403 Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	BPR belum membentuk Komite-Komite akan dilengkapi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Kode F0401 Faktor Positif	1. Indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. Indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F0402 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0403 Faktor Positif	1. Ditinjau dari sisi regulasi, Indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. BPR belum mengimplementasikan indikator Komite audit telah

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, dengan penilaian baik. 3.Manajemen BPR belum menilai bahwa indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, berjalan dengan baik. 4.Indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dinilai baik. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, berjalan dengan baik.
Kode F0404 Faktor Negatif	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite remunerasi dan nominasi belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, BPR tergolong cukup baik.
Kode F0405 Faktor Positif	1.Implementasi indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit Intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F0406 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0407 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1005. Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0501	Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P0501 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR dinilai baik.
Kode H0501 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode H0502	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik.
Kode H0503 BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR memiliki indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dinilai baik.
Kode F0501 Faktor Positif	Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F0502 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0503 Faktor Positif	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR dinilai baik.
Kode F0504 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0505 Faktor Positif	1.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik. BPR memiliki indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dinilai baik.
Kode F0506 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0507 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1006. Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0601 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0602 BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Kode S0603 Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi dan selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku perihal penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS
Kode S0604 BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi	Berdasarkan penilaian terhadap indikator penilaian, BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan termasuk guna pengelolaan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang secara struktur diemban oleh Satuan Kerja Kepatuhan seperti pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan, penerapan APU- PPT & PPPSPM serta pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diperkenankan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	
Kode P0601 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong baik.
Kode P0602 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai baik.
Kode P0603 Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Implementasi indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode H0601 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Adapun sampai dengan akhir tahun 2024, PT BPR Kerta Raharja Perserodatelah melakukan tindak lanjut atas keseluruhan komitmen yang telah dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan umum OJK di tahun buku 2024.
Kode H0602	Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode F0601 Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode F0602 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0603 Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR dinilai baik. Implementasi indikator Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0604 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0605 Faktor Positif	1.Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang dimiliki BPR adalah baik. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode F0606 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0607 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1007. Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0701 BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0702 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0703 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S0704 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode S0705 BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Implementasi indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia yang mencukupi guna pelaksanaan audit intern secara efektif namun masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan baik dari segi kuantitas dan kualitas menyesuaikan kompleksitas dan perluasan scope of control yang terjadi.
Kode P0701 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan pencapaian baik.
Kode P0702 BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang	BPR belum melakukan perencanaan pelaksanaan kaji ulang oleh pihak ekstern perihal hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	
Kode P0703 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode P0704 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.
Kode H0701 BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
Kode H0702 BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, danteepat waktu, dengan penilaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
Kode F0701 Faktor Positif	1.Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2.BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi. 3.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode F0702 Faktor Negatif	BPR telah memiliki Struktur dan Infrastruktur dalam bentuk Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Namun begitu, BPR secara berkelanjutan masih dalam proses penguatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi audit intern secara efektif menyesuaikan kompleksitas usaha BPR.
Kode F0703 Faktor Positif	1. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik. 2.Indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. 3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	4.BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.
Kode F0704 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0705 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dante pat waktu, dengan penilaian baik.
Kode F0706 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0707 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1008. Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0801 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode P0801 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode P0802 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
Kode H0801 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik.
Kode H0802 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Kode F0801 Faktor Positif	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F0802 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0803 Faktor Positif	1.Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
Kode F0804 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0805 Faktor Positif	1.BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik. Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Kode F0806 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0807 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1009. Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0901 BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen	Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0902 BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode S0903 BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode P0901 Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P0902 Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik.
Kode P0903 Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan	Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	
Kode P0904 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik.
Kode P0905 BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0906 BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
Kode P0907 BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
Kode P0908 BPR menerapkan sistem	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pengendalian intern yang menyeluruh	
Kode P0909 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
Kode P0910 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode P0911 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.
Kode H0901 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
manajemen risiko yang lebih baik	
Kode H0902 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada produk dan aktivitas baru di Tahun 2024
Kode H0903 BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F0901 Faktor Positif	1. Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi. BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode F0902 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0903 Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik. 3. Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik. 4. BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik. 6. BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik. 9. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	10. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.
Kode F0904 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0905 Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F0906 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0907 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1010. Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1001 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Kode P1001 BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode P1002 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian baik.
Kode H1001 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode H1002 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan	Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode F1001 Faktor Positif	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F1002 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1003 Faktor Positif	1.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian baik.
Kode F1004 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1005 Faktor Positif	1.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode F1006 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1007 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1011. Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1101 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
Kode S1102 BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode S1103 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P1101 BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode P1102 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1103 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode P1104 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
Kode P1105 BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1106 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dinilai baik.
Kode H1101 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode H1102 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.
Kode H1103 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan	Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
Kode F1101 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi. 2.Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F1102 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1103 Faktor Positif	1.Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik. 2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 4.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 5.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dinilai baik.
Kode F1104 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1105 Faktor Positif	1.Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik. 2.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
Kode F1106 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1107 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1012. Faktor 12: Rencana bisnis

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1201 Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	
Kode S1202 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S1203 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode P1201 Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	
Kode P1202 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian baik
Kode H1201 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode H1202 Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F1201 Faktor Positif	1.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi. 2.Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	
Kode P0703 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode P0704 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.
Kode H0701 BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
Kode H0702 BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
Kode F0701 Faktor Positif	1. Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode F0702 Faktor Negatif	BPR telah memiliki Struktur dan Infrastruktur dalam bentuk Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Namun begitu, BPR secara berkelanjutan masih dalam proses penguatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi audit intern secara efektif menyesuaikan kompleksitas usaha BPR.
Kode F0703 Faktor Positif	1. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	4.BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dinilai baik.
Kode F0704 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0705 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.
Kode F0706 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0707 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1008. Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0801 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode P0801 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode P0802 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
Kode H0801 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik.
Kode H0802 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Kode F0801 Faktor Positif	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F0802 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0803 Faktor Positif	1.Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR saat ini dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
Kode F0804 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0805 Faktor Positif	1.BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dinilai baik. Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Kode F0806 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0807 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1009. Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0901 BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen	Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0902 BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi.
Kode S0903 BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki indikator BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode P0901 Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P0902 Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik.
Kode P0903 Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan	Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	
Kode P0904 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik.
Kode P0905 BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik.
Kode P0906 BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
Kode P0907 BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
Kode P0908 BPR menerapkan sistem	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
pengendalian intern yang menyeluruh	
Kode P0909 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
Kode P0910 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode P0911 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.
Kode H0901 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
manajemen risiko yang lebih baik	
Kode H0902 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada produk dan aktivitas baru di Tahun 2024
Kode H0903 BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F0901 Faktor Positif	1.Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong telah terpenuhi. BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode F0902 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0903 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki Indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian baik. 3. Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik. 4. BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dinilai baik. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian sangat baik. 6. BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPR tergolong baik. 9. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	10. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan penilaian baik.
Kode F0904 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0905 Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F0906 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0907 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1010. Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1001 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Kode P1001 BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode P1002 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian baik.
Kode H1001 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode H1002 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan	Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode F1001 Faktor Positif	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F1002 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1003 Faktor Positif	1.Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan pencapaian baik.
Kode F1004 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1005 Faktor Positif	1.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Implementasi indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Kode F1006 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1007 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1011. Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1101 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
Kode S1102 BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode S1103 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode P1101 BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik.
Kode P1102 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1103 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Kode P1104 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
Kode P1105 BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1106 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dinilai baik.
Kode H1101 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode H1102 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.
Kode H1103 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan	Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
Kode F1101 Faktor Positif	1.Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong telah terpenuhi. 2.Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. Indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Kode F1102 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1103 Faktor Positif	1.Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah baik. 2.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 3.Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 4.Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 5.Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dinilai baik.
Kode F1104 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1105 Faktor Positif	1.Indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR saat ini dinilai baik. 2.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
Kode F1106 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perserodamengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1107 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1012. Faktor 12: Rencana bisnis

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1201 Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	
Kode S1202 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S1203 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode P1201 Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	
Kode P1202 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian baik
Kode H1201 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.
Kode H1202 Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F1201 Faktor Positif	1.Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, berjalan dengan telah terpenuhi. 2.Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Kode F1202 Faktor Negatif	Berdasarkan data struktur organisasi berlaku per akhir Juni 2025, secara prinsip tidak terdapat kekosongan jabatan baik di dalam lingkup Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham maupun pejabat eksekutif yang memiliki tugas dan fungsi yang bersifat strategis. Penguatan secara berkelanjutan secara struktur dan organisasi terbatas : a. Pengelolaan atas Sumber Daya Manusia yang terdapat di dalam struktur organisasi; b. Penguatan upaya menekan tingkat turnover pada tingkat yang minimum secara berkelanjutan; c. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM secara berkelanjutan.
Kode F1203 Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPR dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian baik.
Kode F1204 Faktor Negatif	Berdasarkan hasil analisis terhadap realisasi RBB sampai dengan semester II tahun 2025, BPR mencapai indikator kepatuhan yang baik berdasarkan pendekatan prudential rasio dan penerapan manajemen risiko sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun peningkatan secara berkelanjutan terdapat pada rasio-rasio target bisnis yang belum secara menyeluruh mencapai target yang diharapkan.
Kode F1205 Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Kode F1206 Faktor Negatif	PT BPR Kerta Raharja Perseroda mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1207 Nilai Faktor	1 (Sangat Memadai)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
02	01	Kredit Multiguna	Terdapat beberapa jenis multiguna yaitu multiguna Modal kerja, Investasi, Konsumtif, MCR Multiguna
02	01	Kredit Silantap	Terdapat beberapa jenis silantap yaitu silantap potong gaji dan silantap tunjangan kinerja
02	01	Kredit Resapan	Kredit yang bersumber dari Tabungan atau Deposito
02	01	Kredit Kontruksi	Kredit yang bersumber dari usaha kontruksi
02	01	Kredit Sertifikasi	kredit yang bersumber dari sertifikasi guru
02	01	Kredit Juara Bedas	Kredit tanpa jaminan khusus UMKM warga Kabupaten Bandung
02	01	Kredit Karya Bakti	Kredit khusus pegawai PT BPR Kerta Rahatrja Perseroda
01	01	Tabungan Serbaguna	Produk tabungan diperuntukkan untuk masyarakat umum baik perorangan, non perorangan (Badan Usaha/Badan Hukum) maupun joint account sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
01	01	Tabungan Kotak Mas	Produk tabungan diperuntukkan bagi perorangan baik untuk umum, anak-anak sekolah/pelajar, mahasiswa serta lembaga-lembaga dengan ketentuan dan persyaratan khusus yaitu setoran tabungan dilakukan secara
01	01	Tabungan Umroh	Produk tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan untuk merencanakan ibadah umroh.
01	01	Tabungan Haji	Produk tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan untuk merencanakan ibadah haji.
01	01	Tabungan Simpanan Pelajar	Produk tabungan yang diperuntukkan untuk peserta didik mulai dari jenjang PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTS hingga SMA/MA dan pondok pesantren yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan di Indonesia dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya gemar menabung sejak dini bagi pelajar yang diselenggarakan oleh Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan persyaratan.
01	01	Tabungan Simapan Bedas	Produk tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan/kelompok tertentu baik digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, bantuan sosial, dana hibah, penampung gaji maupun penampung pencairan kredit program dana bergulir, yang pada kondisi tertentu (misal : bantuan hibah, bantuan sosial tidak dikenakan administrasi tabungan dan saldo mengendap).

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan Simanis	Produk tabungan Bank yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat yang dikemas dalam bentuk arisan dengan nominal pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.100.000,- serta dilakukan penarikan pada setiap bulannya.
01	01	Tabungan Simarmasgo	Produk tabungan Bank yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat yang dikemas dalam bentuk arisan yang berisikan seluruh BPR anggota PERBARINDO dengan nominal pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.100.000,- serta dilakukan penarikan pada setiap bulannya.
01	01	Deposito Berjangka	Simpanan dari pihak ketiga (perorangan atau non perorangan) kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan bank. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang hanya bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Produk Deposito pada PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) terdiri dari 3 hari sd 27 hari DOC, deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, deposito 9 bulan, deposito 12 bulan, deposito > 12 bulan.
01	01	Tabungan Sibela	Simpanan berhadiah langsung berupa souvenir atas pembukaan rekening baru tanpa diundi dan nasabah dapat memilih langsung jenis hadiahnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

0

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : 2025

Informasi mengenai penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

IBS Online

B. Sistem Keamanan

Window Defender

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

1. PT USSI Pinbuk Prima Software
2. PT Infokom Exe

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : 2025

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha PT BPR Kerta Raharja sampai dengan tahun 2025 berjalan dengan baik disebabkan :

1. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung selaku pemegang mayoritas
2. Sumber Daya Manusia yang ada cukup berpotensi dan menjanjikan
3. Masih banyak peluang terbuka dan menjanjikan, seperti di sektor riil, (Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan, sektor jasa, Pertanian dan Industri kecil)
4. Pelaksanaan operasional dilakukan secara jemput dana dengan cara langsung datang ke lokasi nasabah selain dukungan IT dengan sistem online nya
5. Dukungan dan Jaringan Kantor (Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kantor Pelayanan)
6. Penambahan sarana dalam rangka meningkatkan pelayanan (payment point) untuk tagihan listrik, telepon, dan lainnya

B. Target Pasar

Fokus pada segmen mikro dan kecil di bidang pangan, kebutuhan sehari-hari, Kesehatan di pasar-pasar tradisional dan usaha home industry yang berada di wilayah kerja BPR Kab Bandung. Penetapan segmen diperkuat dengan penataan target pasar dilokasi-lokasi segmen yang dipetakan secara jelas berikut potensial nilai kredit yang dapat digali dari target pasar tersebut. Penguatan positioning yakni tampil berbeda, unik dan kompetitif dibandingkan pesaing sehingga mampu memenangkan persaingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan					Jumlah Pegawai					
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR		No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan
---	---------------------	----------------------	---------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Keterangan : 0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	
2. Pelayanan	
3. Lainnya	
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	
2. Pegawai Tidak Tetap	
Tingkat Pendidikan	
1. S3	
2. S2	
3. S1	
4. D3	
5. SMA	
6. Lainnya	
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	
2. Perempuan	
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	
2. Usia 26-35 tahun	
3. Usia 36-45 tahun	
4. Usia 46-55 tahun	
5. Usia >55 tahun	

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Assesment PelaksanaanTata Kelola SE OJK 12/ 2024	08-01-2025	02	03	5	KPNO (zoom)
Sosialisasi Update EIR APP	13-01-2025	02	03	5	Sosialisasi Update EIR APP dari Vendor Core Banking System
Pelatihan Proses Akuntansi Amortisasi Kredit di BPR	23-01-2025	01	01	5	Pelatihan Proses Akuntansi Amortisasi Kredit di BPR
Pelatihan Penyusunan Rencana Audit Tahunan dan Laporan Pelaksanaan & Hasil Audit	21-01-2025	02	03	3	KPNO (zoom)
Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bulanan	17-01-2025	02	01	5	KPNO (zoom)
Sosialisasi Ketentuan Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR SE OJK No. 21/ 2024	30-01-2025	02	03	10	KPNO (zoom)
Sosialisasi Evaluasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) Tahun 2025	03-02-2025	01	03	6	KPNO (zoom)
Sosialisasi Bimbingan Teknis Implememntasi NPWP dalam Sistem Coretax	04-02-2025	02	03	3	KPNO (zoom)
Pelatihan Perpajakan Update PPh 21 terbaru 2025 dan Praktik Coretex PPh 21	11-02-2025	02	01	2	Pelatihan Perpajakan Update PPh 21 terbaru 2025 dan Praktik Coretex PPh 21
Sosialisasi Manfaat & Prosedur Pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja	12-02-2025	02	03	2	Sosialisasi Manfaat & Prosedur Pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja
Pelatihan Strategi Pengelolaan Kredit, Analisa Penyelesaian serta Penyelamatan Tunggakan / Non Lancar Kredit yang Sistematis	19-02-2025	02	01	50	Pelatihan Strategi Pengelolaan Kredit, Analisa Penyelesaian serta Penyelamatan Tunggakan / Non Lancar Kredit yang Sistematis
Sosialisasi Webinar Outlok Ekonomi dan Keuangan Tahun 2025	20-02-2025	02	03	2	Sosialisasi Webinar Outlok Ekonomi dan Keuangan Tahun 2025
Sosialisasi FGD (Focus Gorup Discussion) Pengembangan Bisnis BPR/ BPRS dan Sosialisasi Permendagri No. 21 / 2024	22-02-2025	02	03	1	Sosialisasi FGD (Focus Gorup Discussion) Pengembangan Bisnis BPR/ BPRS dan Sosialisasi Permendagri No. 21 / 2024
Pelatihan Sustainability Accounting	06-03-2025	02	03	3	Pelatihan Sustainability Accounting
Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPR	13-03-2025	02	03	3	Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi SE OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR (SE OJK KPMM BPR)	17-03-2025	02	03	3	Sosialisasi SE OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR (SE OJK KPMM BPR)
Sosialisasi Update dan Standarisasi SMKl	16-04-2025	02	03	4	Sosialisasi Update dan Standarisasi SMKl
Pelatihan Analisis Kredit Konprehensif	12-04-2025	02	01	40	Pelatihan Analisis Kredit Konprehensif
Sosialisasi Standarisasi Entry Data	19-04-2025	01	01	27	Sosialisasi Standarisasi Entry Data
Sosialisasi Penggunaan IBS TKS	25-04-2025	02	03	3	Sosialisasi Penggunaan IBS TKS
Sosialisasi Standarisasi Entry Data	26-04-2025	01	01	27	Sosialisasi Standarisasi Entry Data
Sosialisasi Laporan EOI dengan Cretax (Perpajakan)	30-04-2025	02	03	6	Sosialisasi Laporan EOI dengan Cretax (Perpajakan)
Sosialisasi Penyelenggaraan TI oleh BPR/ BPRS	05-05-2025	02	03	3	Sosialisasi Penyelenggaraan TI oleh BPR/ BPRS
Sosialisasi Penggunaan IBS TKS	09-05-2025	02	03	2	Sosialisasi Penggunaan IBS TKS
Sosilisasi Ketentuan BPR/ BPRS	16-05-2025	02	03	4	Sosilisasi Ketentuan BPR/ BPRS
Webminar Series 1 Program Pariwara Antikorupsi 2025	22-05-2025	02	03	2	Webminar Series 1 Program Pariwara Antikorupsi 2025
Pelatihan sertifikasi Direksi tk 2	11-06-2025	02	03	2	Pelatihan sertifikasi Direksi tk 2
Sosialisasi pendekatan best practice dalam menghadapi tindak pidana beresiko tinggi	04-06-2025	02	03	4	Sosialisasi pendekatan best practice dalam menghadapi tindak pidana beresiko tinggi
Sosialisasi penerapan lcofr untuk meningkatkan integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik	13-06-2025	02	03	4	Sosialisasi penerapan lcofr untuk meningkatkan integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik
Sosialisasi Pelaporan sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Froud bagi Lembaga Jasa Keruangan kepada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti minimal 50 milyar	17-06-2025	02	03	15	Sosialisasi Pelaporan sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Froud bagi Lembaga Jasa Keruangan kepada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti minimal 50 milyar
Pelatihan Akuntani	19-06-2025	03	01	64	Pelatihan Akuntani

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi Sipeduli Modul Laporan Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Modul Laporan	19-06-2025	02	03	4	Sosialisasi Sipeduli Modul Laporan Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Modul Laporan
Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak	16-06-2025	02	03	1	Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak
Sosialisasi Proses Hak Tanggungan dari Pendaftaran, Syarat-syarat Dokumen, Mekanisme Lelang, sampai dengan agunan telah selesai lelang,	23-06-2025	02	01	10	Sosialisasi Proses Hak Tanggungan dari Pendaftaran, Syarat-syarat Dokumen, Mekanisme Lelang, sampai dengan agunan telah selesai lelang,
Sosialisasi Kick Off Piloting Aplikasi SCV BPR/ BPRS	24-06-2025	02	03	7	Sosialisasi Kick Off Piloting Aplikasi SCV BPR/ BPRS
Sosialisasi ERM Practice Sharing	26-06-2025	02	03	1	Sosialisasi ERM Practice Sharing
Sosialisasi Laporan Pemanfaatan Dukcapil	08-07-2025	02	03	1	Sosialisasi Laporan Pemanfaatan Dukcapil
Pelatihan Kegiatan Hari Indonesia menabung (HIM)	17-07-2025	02	03	4	Pelatihan Kegiatan Hari Indonesia menabung (HIM)
Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan	17-07-2025	02	01	18	Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan
Pelatihan Kegiatan Pendampingan Piloting aplikasi SCV BPR/BPRS	23-07-2025	02	03	2	SCV BPR/BPRS
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Perancangan Kontrak	16-07-2025	02	03	1	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Perancangan
Medlakukan Audit dan Penyusunan SOP Audit Intern berbasis Kepatuhan dan Risiko	25-07-2025	02	03	3	Medlakukan Audit dan Penyusunan SOP Audit Intern berbasis Kepatuhan dan Risiko
Pelatihan Risk and Governance Summit (RGS) 2025	25-07-2025	02	03	2	Pelatihan Risk and Governance Summit (RGS) 2025
Pelatihan Sosialisasi Teknis Pendaftaran dan Pelaporan Kampanye Antikorupsi 2025	01-09-2025	02	03	3	Pelatihan Sosialisasi Teknis Pendaftaran dan Pelaporan Kampanye Antikorupsi 2025
Strategi Pemasaran Berkelas Untuk Menjaring Nasabah Berkelas	18-09-2025	02	03	2	Strategi Pemasaran Berkelas Untuk Menjaring Nasabah Berkelas
Membangun Layanan Prima di BPR	19-09-2025	02	03	2	Membangun Layanan Prima di BPR
Leadership Skill For Middle Manajement	23-09-2025	02	03	6	Leadership Skill For Middle Manajement

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Perhitungan CKPN	13-09-2025	01	01	23	Perhitungan CKPN
Sosialisasi Pelaporan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan	30-10-2025	02	03	2	Sosialisasi Pelaporan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Sosialisasi Pengisian Dokumen Kontrol dan Laporan Pemeriksaan	30-10-2025	02	03	1	Sosialisasi Pengisian Dokumen Kontrol dan Laporan Pemeriksaan
Pelatihan Aplikasi Digital Sirenbis	12-11-2025	02	03	3	Pelatihan Aplikasi Digital Sirenbis
Sosialisasi Tata Cara Pemabayaran Premi Penjaminan Simpanan dan Premi	04-11-2025	02	03	2	Sosialisasi Tata Cara Pemabayaran Premi Penjaminan Simpanan dan Premi
Pelatihan Audit Intern Berbasis Kepatuhan dan Risiko	04-11-2025	02	01	35	Pelatihan Audit Intern Berbasis Kepatuhan dan Risiko
Sosialisasi Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP)	06-11-2025	01	03	1	Sosialisasi Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP)
Pelatihan tentang Strategi Pemasaran yang Efektif	06-11-2025	02	03	40	Pelatihan tentang Strategi Pemasaran yang Efektif
Pelatihan Sosialisasi APOLO	06-11-2025	02	03	3	Pelatihan Sosialisasi APOLO
Pelatihan Analisis Kredit UMKM	15-11-2025	02	03	6	Pelatihan Analisis Kredit UMKM
Sosialisasi Pelatihan Aplikasi Digital SI-RAKB	21-11-2025	02	01	4	Sosialisasi Pelatihan Aplikasi Digital SI-RAKB
Pelatihan Fundamental SDM IT	25-11-2025	02	03	1	Pelatihan Fundamental SDM IT
Sosialisasi Rencana Bisnis Bank Perekonomian	05-12-2025	02	03	6	Sosialisasi Rencana Bisnis Bank Perekonomian
Pelatihan PPH 21 & SPT Orang Pribadi Era Coretax	08-12-2025	02	01	3	Pelatihan PPH 21 & SPT Orang Pribadi Era Coretax
Pelatihan Penerapan & Monitoring Strategi Pemasaran	19-12-2025	02	03	46	Pelatihan Penerapan & Monitoring Strategi Pemasaran
Pelatihan POJK & PADK	30-12-2025	02	03	4	Pelatihan POJK & PADK

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penempatan pada Bank Lain		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)		
-/- Provisi Belum Diamortisasi		
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyertaan Modal		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Agunan yang diambil alih		
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Aset Tidak Berwujud		
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai		
Aset Antarkantor		
Aset Keuangan Lainnya		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Lainnya		
TOTAL ASET		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera		
Simpanan		
a. Tabungan		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
b. Deposito		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Simpanan dari Bank Lain		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Pinjaman yang Diterima		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Diskonto Belum Diamortisasi		
Dana Setoran Modal-Kewajiban		
Liabilitas Antarkantor		
Liabilitas Lainnya		
TOTAL LIABILITAS		
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar		
b. Modal yang Belum Disetor -/-		
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio		
b. Modal Sumbangan		
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas		
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
c. Lainnya		
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		
Cadangan		
a. Umum		
b. Tujuan		
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu		
b. Tahun Berjalan		
TOTAL EKUITAS		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional		
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga		
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro		
Tabungan		
Deposito		
Sertifikat Deposito		
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga		
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi		
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing		
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga		
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku		
e Pemulihan CKPN		
f Dividen		
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		
h Keuntungan penjualan AYDA		
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi		
j Pemulihan penurunan nilai AYDA		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya		
Beban Operasional		
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan		
ii. Deposito		
iii. Simpanan dari bank lain		
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia		
2) Dari Bank Lain		
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
4) Berupa Pinjaman Subordinasi		
v. Lainnya		
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga		
b. Penempatan pada Bank Lain		
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
d. Penyertaan Modal		
e. Aset Keuangan Lainnya		
4 Beban Pemasaran		
5 Beban Penelitian dan Pengembangan		
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah		
ii. Honorarium		
iii. Lainnya		
b Beban Pendidikan dan Pelatihan		
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor		
ii. Lainnya		
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris		
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
f Beban Premi Asuransi		
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
h Beban Barang dan Jasa		
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi		
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal		
b. Kejahatan eksternal		
k Pajak-pajak		
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing		
b Kerugian Penjualan Surat Berharga		
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method		
d Kerugian penjualan AYDA		
e Kerugian penurunan nilai AYDA		
f Lainnya		
Laba (Rugi) Operasional		
Pendapatan Non Operasional		
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Beban Non Operasional		
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Laba (Rugi) Non Operasional		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		
Taksiran Pajak Penghasilan		
Pendapatan Pajak Tangguhan		
Beban Pajak Tangguhan		
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik		
b. Tagihan Komitmen Lainnya		
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
b. Penerusan Kredit		
c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan		
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain		
3) Surat Berharga		
4) Lainnya		
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan		
2) Penempatan pada Bank Lain		
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku		
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku		
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit		
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
Kewajiban Kontinjensi		
Rekening Administratif Lainnya		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
-----	---------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

Form B.04.00
Laporan Perubahan Ekuitas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan	Jumlah
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga		
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi		
Penerimaan beban klaim asuransi		
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Pendapatan operasional lainnya		
Pembayaran beban bunga		
Beban gaji dan tunjangan		
Beban umum dan administrasi		
Beban operasional lainnya		
Pendapatan non operasional lainnya		
Beban non operasional lainnya		
Pembayaran pajak penghasilan		
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban		
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain		
Kredit yang diberikan		
Agunan yang diambil alih		
Aset lain-lain		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera		
Tabungan		
Deposito		
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima		
Liabilitas imbalan kerja		
Liabilitas lain-lain		
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
Arus Kas neto dari aktivitas operasi		
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris		
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud		
Pembelian/penjualan Surat Berharga		
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi		
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan		
Pembayaran dividen		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan		
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas		
Kas dan setara Kas awal periode		
Kas dan setara Kas akhir periode		

Form C.01.00

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : 2025

Berikut adalah laporan AKuntan Publik berdasarkan hasil audit untuk periode posisi laporan adalah sebagai berikut :

PT Bank Perekonomian Rakyat
Kerta Raharja Perseroda
Laporan Keuangan
31 Desember 2025
dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
serta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Laporan Auditor Independen

	Halaman
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Aep Hendar Cahyad
Alamat kantor : Jl. Raya Soreang No. 15 Kab. Bandung
Nomor Telepon Kantor : 022- 5893334
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Roni Maryono
Alamat kantor : Jl. Raya Soreang No. 15 Kab. Bandung
Nomor Telepon Kantor : 022- 5893334
Jabatan : Direktur Operasional
3. Nama : Evi Yulianti
Alamat kantor : Jl. Raya Soreang No. 15 Kab. Bandung
Nomor Telepon Kantor : 022- 5893334
Jabatan : Direktur Kepatuhan

Untuk dan atas nama PT BPR Kerta Raharja Perseroda menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Kerta Raharja Perseroda;
2. Laporan keuangan PT BPR Kerta Raharja Perseroda tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat;
3.
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT BPR Kerta Raharja Perseroda telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan Perumda PT BPR Kerta Raharja Perseroda tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

- c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumda PT BPR Kerta Raharja Perseroda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR Kerta Raharja Perseroda.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 17 Maret 2026

			
<u>Roni Maryono</u> Direktur Operasional	<u>Aep Hendar Cahyad</u> Direktur Utama	<u>Evi Yulianti</u> Direktur Kepatuhan	



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp. : 022-7561965
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

No. : 00116/2.0923/AU.8/07/1531-4/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda
Soreang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda ("BPR"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPR tanggal 31 Desember 2025, dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BPR berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPR.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Darwansah, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

17 Maret 2026



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025

A S E T

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	Rp
Kas	4	5.551.081.900	4.979.860.800
Pendapatan bunga yang akan diterima	5	5.030.913.454	5.420.170.285
Penempatan pada bank lain :	3b,6		
Pihak ketiga		100.647.317.086	106.156.875.511
Cadangan kerugian penurunan nilai		(855.683.695)	(281.684.482)
Jumlah Bersih		99.791.633.391	105.875.191.029
Kredit yang diberikan	3e,7,32		
Jumlah kredit yang diberikan		463.867.759.253	465.768.691.932
Cadangan kerugian penurunan nilai		(51.870.203.300)	(32.921.613.833)
Jumlah bersih		411.997.555.953	432.847.078.099
Agunan yang diambil alih	3g,8	7.384.087.384	1.661.860.000
Aset tetap - bersih	3h,9	19.032.284.661	20.017.771.426
Aset tidak berwujud	3h,10	187.445.992	334.563.874
Aset lain-lain	11	1.440.555.332	2.713.308.929
Aset pajak tangguhan	3m,16c	121.572.245	—
JUMLAH ASET		550.537.130.312	573.849.804.443

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

LIABILITAS DAN EKUITAS

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
LIABILITAS			
Liabilitas segera	12	2.855.173.687	2.982.849.504
Utang bunga	13	690.014.374	640.781.487
Simpanan	14,33	349.020.001.886	339.644.444.705
Simpanan dari bank lain	15	76.889.435.176	84.786.059.787
Utang pajak	3m,16b	285.244.723	475.038.243
Pinjaman yang diterima	17	44.950.800.861	21.681.396.002
Liabilitas lain-lain	18	3.697.062.808	53.542.474.378
Liabilitas imbalan kerja	3p,19	747.139.562	273.635.496
Jumlah liabilitas		479.134.873.077	504.026.679.602
EKUITAS			
Modal saham			
Modal disetor	20	52.980.000.000	52.980.000.000
Saldo laba			
Cadangan	21	12.912.092.014	11.929.333.808
Belum ditentukan tujuannya		5.510.165.221	4.913.791.033
Jumlah ekuitas		71.402.257.235	69.823.124.841
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		550.537.130.312	573.849.804.443

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :	31,23		
Bunga		94.600.976.476	74.744.511.086
Provisi dan komisi		3.216.178.632	4.912.923.096
Biaya transaksi		(340.225.244)	(329.457.958)
Jumlah pendapatan bunga		97.476.929.864	79.327.976.224
Beban bunga	31,24	(22.220.361.312)	(21.705.240.887)
Pendapatan bunga, bersih		75.256.568.552	57.622.735.337
Pendapatan operasional lainnya	25	15.309.720.727	12.649.948.959
Beban operasional :			
Kerugian penurunan nilai	26	(26.500.047.255)	(13.020.579.020)
Pemasaran	27	(659.504.165)	(1.044.203.702)
Tenaga kerja	28	(28.183.113.864)	(24.254.355.333)
Administrasi dan umum	29	(27.007.440.522)	(24.764.610.934)
Jumlah beban operasional		(82.350.105.806)	(63.083.748.989)
Laba operasional		8.216.183.473	7.188.935.307
Pendapatan non operasional	30	-	101.864.982
Beban non operasional lainnya	31	(952.613.657)	(818.186.276)
Laba sebelum pajak penghasilan		7.263.569.816	6.472.614.013
Pajak kini	3m,16a	(1.874.976.840)	(1.558.822.980)
Pendapatan pajak tangguhan		121.572.245	-
Laba bersih		5.510.165.221	4.913.791.033
Penghasilan komprehensif lain		-	-
Total Laba (rugi) komprehensif		5.510.165.221	4.913.791.033

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025

	Modal saham	Saldo laba		Jumlah
		Cadangan	Laba (rugi)	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2023	52.980.000.000	10.902.154.188	5.135.898.101	69.018.052.289
Dividen	—	—	(2.824.743.955)	(2.824.743.955)
Pembagian dana kesejahteraan dan jasa produksi	—	—	(1.129.897.583)	(1.129.897.583)
CSR / Dana Sosial	—	—	(154.076.943)	(154.076.943)
Penambahan cadangan	—	1.027.179.620	(1.027.179.620)	—
Laba bersih	—	—	4.913.791.033	4.913.791.033
Saldo per 31 Desember 2024	52.980.000.000	11.929.333.808	4.913.791.033	69.823.124.841
Dividen	—	—	(2.702.585.068)	(2.702.585.068)
Pembagian dana kesejahteraan dan jasa produksi	—	—	(1.081.034.027)	(1.081.034.027)
CSR / Dana Sosial	—	—	(147.413.731)	(147.413.731)
Penambahan cadangan	—	982.758.207	(982.758.207)	—
Laba bersih	—	—	5.510.165.221	5.510.165.221
Saldo per 31 Desember 2025	52.980.000.000	12.912.092.014	5.510.165.221	71.402.257.235

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA

LAPORAN ARUS KAS

**Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025**

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan pendapatan bunga	94.600.976.476	74.744.511.086
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	2.875.953.388	4.583.465.138
Pendapatan operasional lainnya	15.309.720.727	12.649.948.959
Pembayaran beban bunga	(22.220.361.312)	(21.705.240.887)
Beban gaji dan tunjangan	(28.183.313.864)	(24.254.355.333)
Beban umum dan administrasi	(27.007.440.522)	(24.764.610.934)
Beban operasional lainnya	(659.504.165)	(1.044.203.702)
Pendapatan non operasional lainnya	-	101.864.982
Beban non operasional lainnya	(952.613.657)	(818.186.276)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.875.171.276)	(1.558.822.980)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(5.302.463.537)	21.841.023.640
Penempatan pada bank lain	5.517.712.423	43.899.773.666
Kredit yang diberikan	1.900.932.679	(48.662.710.932)
Aset lain-lain	(4.571.090.033)	650.818.673
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Liabilitas segera	(135.819.815)	(139.183.445)
Simpanan	9.375.557.181	(16.971.314.305)
Simpanan dari bank lain	(7.896.624.611)	-
Pinjaman yang diterima	23.269.404.859	(10.244.843.471)
Liabilitas imbalan kerja	473.704.066	(320.207.665)
Liabilitas lain-lain	(49.985.777.767)	48.807.181
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4.533.781.240	8.036.533.395
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(1.259.975.072)	(5.050.309.840)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.259.975.072)	(5.050.309.840)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembayaran dividen	(2.702.585.068)	(2.824.743.955)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(2.702.585.068)	(2.824.743.955)
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	571.221.100	161.479.600
Kas dan setara kas pada awal tahun	4.979.860.800	4.818.381.200
Kas dan setara kas pada akhir tahun	5.551.081.900	4.979.860.800

**Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

1. U M U M

PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda selanjutnya disebut ("BPR") didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja. PD BPR Kabupaten Bandung merupakan penggabungan dari 15 PD BPR di wilayah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang pembubaran dan konsolidasi PD BPR Kabupaten Bandung. Izin operasional penggabungan usaha diperoleh dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Konsolidasi) 15 PD BPR di Kabupaten Bandung menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung (PD BPR Kabupaten Bandung). Izin prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR berdasarkan Surat OJK-S-221/KR.2/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Persetujuan Prinsip Perubahan bentuk Badan Hukum BPR dan melengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 PBI No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006.

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 34 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Janti Rahmajanti, SH berkedudukan di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-41563.40.10.2014 tanggal 28 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian dan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

Kegiatan utama BPR adalah dalam bidang perbankan dengan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan serta memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan. BPR berkedudukan di Jalan Raya Soreang No. 26 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat serta mempunyai; 1 (satu) Kantor Pusat Operasional, 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, dan 14 (empat belas) Kantor Cabang. Jumlah karyawan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah 212 dan 196 orang.

Berdasarkan akta notaris Richo Layer, S.H., M.Kn. No. 56 tanggal 15 Desember 2025 susunan Komisaris dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Drs. H. Idat Mustari Sutarya, S.H., M.H.	----
Komisaris	Firman Budiawan, S.H., M.H.	Drs. H. Idat Mustari Sutarya, S.H.
Komisaris	----	Firman Budiawan, S.H., M.H.
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Ir. H. Aep Hendar Cahyad, M.H.	Ir. H. Aep Hendar Cahyad
Direktur Operasional	Roni Maryono, S.E	----
Direktur Kepatuhan	Evi Yulianti, S.T	Drs. H. Abdul Aziiz Jayawisastra, M.Si.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan BPR telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) dan mencerminkan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan dalam SAK EP. Tahun buku ini merupakan periode penerapan pertama kali SAK EP oleh BPR.

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan BPR disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EP ini merupakan penerapan pertama kali oleh BPR.

Sebelum penerapan SAK EP, Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar lain sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan.

b. Instrumen Keuangan

Aset keuangan adalah kas, piutang, atau instrumen kontraktual yang memberikan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain.

Liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

1) Aset keuangan diklasifikasikan sebagai:

- a. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal.
- b. Piutang usaha dan pinjaman yang diberikan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada)
- c. Investasi jangka pendek/efek yang diperdagangkan diukur pada nilai wajar jika dapat ditentukan dengan andal.

2) Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai:

- a. Utang usaha dan utang lain-lain diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.
- b. Pinjaman bank dan utang obligasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Entitas mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan.

Pengukuran Awal

Mensyaratkan model biaya perolehan diamortisasi untuk seluruh instrumen keuangan dasar. Pada pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada nilai wajar, yang umumnya merupakan harga transaksi.

Pengukuran Selanjutnya

- 1) Aset dan liabilitas keuangan dasar: diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.
- 2) Investasi ekuitas publik : nilai wajar dapat diukur secara andal.
- 3) Instrumen kompleks (derivatif, sekuritisasi): mengukur seluruh instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar dan mengakui perubahan nilai wajar di laba rugi.
- 4) Ekuitas yang tidak diperdagangkan secara publik dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai

Penurunan Nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, entitas langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.

Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasian, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:

- 1) Kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
- 2) Pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
- 3) Kreditor memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditor jika bukan, karena alasan ekonomi atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
- 4) Terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- 5) Data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomi nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (Lanjutan)

Faktor lain dapat juga menjadi bukti penurunan nilai, termasuk perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomi atau legal di mana penerbit beroperasi.

Penghentian Pengakuan

1) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika salah satu dari:

- a. Hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan kedaluwarsa atau diselesaikan
- b. Entitas mengalihkan kepada pihak lain secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan, atau

2) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) hanya ketika liabilitas tersebut berakhir yaitu:

- a) Ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.
- b) Jika peminjam dan pemberi pinjaman mengganti instrumen keuangan dengan syarat yang berbeda secara substansial, maka entitas peminjam dan pemberi pinjaman mencatat transaksi tersebut sebagai pengakhiran liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.
- c) Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang dihapuskan atau yang dialihkan kepada pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih.

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi pihak berelasi sebagaimana diatur SAK EP Bab 33 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas yang menyusun laporan keuangannya (entitas pelapor):

- a) orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
 - iii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

- b) suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. entitas tersebut dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya setiap entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi satu dengan yang lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lainnya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari entitas ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja bagi imbalan para pekerja entitas pelapor maupun imbalan pekerja dari suatu entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. entitas tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. entitas tersebut, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
 - viii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas tersebut).

Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak berelasi diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima.

BPR menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan, sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyeteroran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase</u>
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10%
Macet	100%

e. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan CKPN kredit dan provisi kredit.

Pemberian dan penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/ baki debet dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aset produktif

Penggolongan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

e. Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

BPR wajib menetapkan Kualitas Aset Produktif yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif untuk 1 debitur pada BPR yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset produktif terhadap beberapa rekening aktiva 1 debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset dibentuk berdasarkan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal minimum penyisihan kerugian sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penggolongan Aset Produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.

Penghitungan kewajiban penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh BPR sesuai dengan ketentuan POJK No 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

PPKA Umum

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Lancar	: 0,5%
---	--------

PPKA Khusus

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Dalam Perhatian Khusus	: 3%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Kurang Lancar	: 10%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Diragukan	: 50%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Macet	: 100%

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

e. Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

Pembentukan PPKA dengan klasifikasi lancar dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPKA ditetapkan paling tinggi sebesar:

<u>Persentase</u>	<u>Keterangan</u>
100%	Dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
85%	Dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
80%	Dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
70%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penelitiannya dilakukan sampai 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
60%	Dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
50%	Dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi yang berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.
50%	Dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.
50%	Dari nilai hipotik atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan yang telah dilakukan pengikatan hipotik atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

e. Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (Lanjutan)

50%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penyelesaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
50%	Untuk bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.
30%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penelitiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
20%	Dari nilai agunan yang dinilai satu tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur dalam standar penilaian yang berlaku.

Agunan selain yang dimaksud di atas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPKA.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan:

1. Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
2. Tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan berupa kendaraan bermotor:

1. Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
2. Tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

Aktiva produktif dihapusbukukan pada saat manajemen menyatakan bahwa Aktiva Produktif tersebut tidak mungkin tertagih. Penerimaan kembali Aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya dalam tahun berjalan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

e. Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) melakukan perhitungan CKPN secara Collective Assesment berdasarkan :

1. Karakteristik risiko audit yang sama yaitu kredit berdasarkan sektor ekonomi
2. Individual yang tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai

Formula perhitungan CKPN Collective Assesment :

Probability of Default (PD) x Loss Given Default (LGD) x Exposure at Default (EAD)

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) menggunakan model statistik perhitungan Probability of Default (PD) metode *Migration Analysis* dengan cara:

- Dilakukan perbandingan secara YoY/Year of Year
- Data yang digunakan berdasarkan kolektibilitas
- Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis tingkat migrasi outstanding kredit dari kolektibilitas tertinggi ke kolektibilitas terendah.
- Data nominatif kredit minimal 12 bulan terakhir dengan pengelompokkan berdasarkan kolektibilitas dan risiko kredit yang ditentukan

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) menggunakan model statistik perhitungan Loss Given at Default (LGD) metode *Expected Recoveries* dengan cara:

- Data hapus buku pada 5 tahun terakhir
- Pisahkan data berdasarkan tahun penghapusbukuan
- Ambil data posisi saldo Debius per masing-masing tahun
- Hitung suku bunga efektif dan NPV
- Hitung *Recovery Rate* dan *Expected Recoveries*

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

f. Kebijakan Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsesi kepada debitur, yaitu konsesi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.

Restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang masih memenuhi kewajibannya setelah kredit di restrukturisasi. Cara Restrukturisasinya yaitu :

1. Modifikasi persyaratan kredit: penurunan suku bunga, perpanjangan, pengurangan tunggakan.
2. Penambahan fasilitas kredit: *fresh money* atau konversi tunggakan bunga.

g. Agunan yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih atau AYDA adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela pemilik agunan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik. agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR (*debt to asset swap*).

Penyelesaian kredit terkait agunan :

1. Penyerahan agunan sebagai penyelesaian kredit. Pengambilalihan agunan merupakan penyelesaian kredit. AYDA dicatat hanya yang berasal dari penyelesaian kredit.
2. Penjualan agunan (bersama atau dengan persetujuan debitur) untuk melunasi kewajiban debitur. Pengambilalihan agunan merupakan bagian dari proses penyelesaian kredit.

Pengambilalihan Agunan:

1. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR tidak mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur tidak membayar kekurangannya maka perjanjian kredit selesai dan kemudian dicatat sebagai AYDA.
2. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur membayar kekurangannya maka perjanjian kredit belum selesai dan kemudian dicatat dalam Rekening Administratif.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

h. Aset Tetap

Aset tetap dibukukan berdasarkan nilai perolehannya. Berkaitan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991 (Pasal 1), kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ke-13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan, pengelompokan aset tetap bukan bangunan berdasarkan SK Menteri Keuangan NO.138/KMK-03/2002, dan aset tetap dan inventaris kecuali tanah diamortisasi pada bulan dilakukan pengeluaran dan atau selesainya pekerjaan. Sesuai dengan Surat Edaran nomor 138/SE-DIR/BPR-MK/AK/I/2016 per tanggal 8 Januari 2016, apabila aset tetap harga perolehannya Rp 1.000.000,- atau lebih maka wajib dilakukan penyusutannya. Persentase penyusutan atau amortisasi sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif penyusutan (Per Tahun)
I. Bukan Bangunan		
- Kelompok 1	4	25%
- Kelompok 2	8	12,50%
- Kelompok 3	16	6,25%
- Kelompok 4	20	5%
II. Bangunan Permanen		
- Permanen	20	5%
- Tidak Permanen	10	10%

i. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

j. Simpanan

Tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

k. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet (*non-performing*). Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non-performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

l. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diperlakukan sebagai pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan Perkreditan diakui pada saat terjadinya. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan namun terkait dengan jangka waktu, diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

m. Pajak Penghasilan

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Pajak Penghasilan Kini (*Current Tax*)

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk periode berjalan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Kewajiban pajak kini diakui sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar atas laba kena pajak periode berjalan. Jika pembayaran pajak yang telah dilakukan melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisih tersebut diakui sebagai aset pajak kini. Kewajiban atau aset pajak kini dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada/diterima dari otoritas pajak, dengan menggunakan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)

Pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, kecuali untuk *goodwill* yang tidak dapat dikurangkan pajak dan pengakuan awal aset/liabilitas dari transaksi non-bisnis.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar. Pajak tangguhan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tangguhan tersebut berasal dari transaksi yang langsung diakui ke ekuitas, maka dampaknya juga diakui langsung ke ekuitas.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

n. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank yang berjangka waktu singkat.

o. Cadangan Umum

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, perusahaan wajib setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud akan ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

p. Liabilitas Imbalan Kerja

Penghitungan liabilitas imbalan kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat Bab 28 tentang "Imbalan Kerja.". Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas besarnya cadangan imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan. Perusahaan sudah melakukan persiapan (menghitung) Imbalan Pasca Kerja dengan melakukan perhitungan secara internal.

q. Penggunaan Estimasi

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen BPR untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Disebabkan karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil akrual yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

4. KAS

	2025 Rp	2024 Rp
Kantor Pusat Operasional	1.177.569.300	775.559.400
Kantor Pusat Non Operasional	154.456.900	338.440.300
Cabang Banjaran	773.037.400	677.570.800
Cabang Ciwidey	492.912.400	530.200.100
Cabang Pameungpeuk	293.203.400	87.289.500
Cabang Pangalengan	227.145.500	216.830.900
Cabang Ciparay	209.169.000	325.378.300
Cabang Cicalengka	317.134.200	343.106.500
Cabang Paseh	328.247.900	471.613.700
Cabang Majalaya	308.296.400	347.864.600
Cabang Cicadas	316.918.000	186.657.000
Cabang Padalarang	214.976.600	132.358.100
Cabang Batujajar	198.955.300	304.589.500
Cabang Sindangkerta	158.208.400	53.190.800
Cabang Cikalongwetan	230.130.300	111.819.400
Cabang Cipeundeuy	150.720.900	77.391.900
Jumlah	<u>5.551.081.900</u>	<u>4.979.860.800</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Jasindo Syariah, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2025 Rp	2024 Rp
Kredit Umum	4.939.312.189	5.273.916.815
Kredit Program	27.469.119	5.789.089
Antar Bank Aktiva (ABA)	64.132.146	140.464.381
Jumlah	<u>5.030.913.454</u>	<u>5.420.170.285</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2025 Rp	2024 Rp
Giro pada bank lain :		
Pihak ketiga :		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	15.989.695.520	2.223.703.423
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	918.807.522	1.528.171.484
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	337.491.375	501.523.023
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100.307.470	99.909.374
PT Bank Yudha Bhakti	45.851.622	45.076.637
PT Bank Permata Syariah	10.249.943	12.726.078
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.928.930	2.003.871
Jumlah giro pada bank lain	<u>17.404.332.382</u>	<u>4.413.113.890</u>
Tabungan dan deposito :		
Tabungan :		
Pihak ketiga :		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	17.594.546.077	6.582.354.308
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	8.160.006.073	16.141.108.055
PT Bank Permata, Tbk	1.164.436.459	1.393.454.241
PT BPRS Artha Madani	750.000.000	-
PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera	510.905.636	501.075.000
PT Bank Central Asia, Tbk	400.443.944	100.741.344
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	334.090.199	1.359.976.101
PT BPR Delta Artha Perseroda	313.702.258	-
PT BPRS HIK Parahyangan	296.271.152	59.977.531
PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia	201.054.394	-
PT BPR Jombang Perseroda	113.069.487	-
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	63.815.911	64.335.577
PT Bank Danamon Syariah	34.654.682	34.206.214
PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali	24.650.972	24.568.202
PT BPR Kirana Indonesia	16.776.377	4.315.499
PT Bank Perkreditan Rakyat Karyaajatnika Sadaya	5.116.519	6.608.094
PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Jabar	4.444.564	4.435.349
PT Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar	-	61.606.107
Jumlah tabungan	<u>29.987.984.704</u>	<u>26.338.761.622</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
Deposito :		
Pihak ketiga :		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	31.055.000.000	31.055.000.000
PT BPR Karya Utama Jabar	4.000.000.000	4.000.000.000
PT BPR Subang	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Kuningan	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Garut	2.000.000.000	2.000.000.000
PD BPR Sumedang	2.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Serang (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Nusumma Jatim	1.000.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Kota Bandung	1.000.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Kabupaten Cirebon	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Dassa	1.000.000.000	-
PT BPR Deltha Artha Perseroda	800.000.000	-
PT BPR Intan Jabar	550.000.000	550.000.000
PT BPR Christa Jaya Perdana	500.000.000	-
PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)	500.000.000	500.000.000
PD BPR PK Balongan / Indramayu Jabar	500.000.000	500.000.000
PT BPR Karawang Jabar (Perseroda)	500.000.000	3.000.000.000
PT BPR Ceper Permata Artha	500.000.000	500.000.000
PT BPR Lima Padma Mandiri	500.000.000	500.000.000
PT BPR Kirana	300.000.000	300.000.000
PT BPR Artha Niaga Finatama	250.000.000	250.000.000
PT BPR Tata Asia	200.000.000	200.000.000
PT BPR Tata Artha Sadaya	100.000.000	1.100.000.000
PT BPR Cianjur Jabar	-	1.000.000.000
PT BPRS Amanah Rabbaniah	-	1.000.000.000
PT BPRS HIK Parahyangan	-	2.000.000.000
PT BPR Baturaja	-	1.000.000.000
PD BPR Artha Galunggung	-	1.000.000.000
PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	-	1.000.000.000
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	-	1.000.000.000
PT BPRS Artha Madani	-	1.000.000.000
PT BPR Majatama	-	1.000.000.000
PT BPR Berkah (Perseroda)	-	1.000.000.000
PT BPR Tapin Sejahtera	-	1.000.000.000
PT BPR Bumi Bandung Kencana	-	1.000.000.000
PT BPR Sarana Utama Multimedia	-	1.000.000.000
Bank Banten	-	1.000.000.000
PT BPR Majalengka	-	500.000.000
Jumlah dilanjutkan	<u>53.255.000.000</u>	<u>68.955.000.000</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah lanjutan	53.255.000.000	68.955.000.000
PD BPR Parungpanjang	-	2.000.000.000
PT BPR Baturaja	-	1.000.000.000
PT BPR Artha Karya Usaha	-	1.000.000.000
Perumda BPR Galuh	-	500.000.000
PT BPRS Al Ihsan	-	500.000.000
PD BPR Kab. Bulungan	-	500.000.000
PT BPR Bontang	-	500.000.000
PD BPR Dhanaagung Karangampel	-	250.000.000
PT BPR Tata Asia	-	200.000.000
 Jumlah deposito	 53.255.000.000	 75.405.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain	100.647.317.086	106.156.875.511
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(855.683.695)	(281.684.482)
 Jumlah	 99.791.633.391	 105.875.191.029

Tingkat suku bunga giro dan tabungan selama tahun 2025 dan 2024 berkisar antara 0,5% - 4% dan 0,5 % - 4%. Tingkat suku bunga rata-rata deposito pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 2,8% - 6,75% dan 2,8% - 6,75%

Perubahan Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal tahun	281.684.482	598.125.896
Kerugian penurunan nilai tahun berjalan	855.683.695	252.528.746
Pemulihan kerugian tahun berjalan	(281.684.482)	(568.970.160)
 Saldo akhir tahun	 855.683.695	 281.684.482

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen BPR, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2025 digolongkan lancar. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai pada penempatan pada bank lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan penggunaan

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Silantap	191.987.003.106	194.780.569.515
Multiguna	185.480.566.089	191.213.449.528
Sertifikasi	31.095.982.785	30.339.193.289
Karya Bhakti	12.395.790.996	13.538.023.702
MCR Juara Bedas	6.163.890.822	19.169.127.268
MCR Multiguna	7.819.063.080	7.077.603.967
Resapan	6.906.933.120	7.760.031.703
Modal Kerja	849.981.394	850.877.930
LPDB	693.641.612	735.281.497
KRK	1.000.000.000	1.900.000.000
LKM	847.014.099	887.107.951
Pensiun	504.869.220	546.509.462
Investasi	204.618.293	205.518.293
Konsumsi	82.170.664	9.388.364
MCR	88.824.189	90.906.889
Selisih bunga (Selisih Flat to EIR)	20.750.200.661	-
Jumlah	466.870.550.130	469.103.589.357
Provisi kredit	(3.107.677.689)	(3.605.045.108)
Biaya transaksi	104.886.812	270.147.683
Jumlah kredit yang diberikan	463.867.759.253	465.768.691.932
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.870.203.300)	(32.921.613.833)
Jumlah bersih	411.997.555.953	432.847.078.099

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2025 Rp	2024 Rp
Perdagangan besar dan eceran	62.784.766.010	74.227.846.537
Kegiatan usaha yang belum jelas batasannya	20.568.900.250	28.353.835.586
Konstruksi	32.672.637.121	38.743.429.415
Industri Pengolahan	549.414.221	701.991.206
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.982.902.334	2.685.893.034
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	7.145.509.253	6.951.240.253
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan	2.187.396.153	1.577.678.865
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1.924.662.826	1.249.848.882
Perantara Keuangan	1.597.602.417	693.065.920
Jasa Pendidikan	3.818.275.800	1.162.290.519
Real Estate	275.000.000	744.999.200
Pertambangan dan Penggalian	104.097.072	153.018.254
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan	2.631.381.552	4.174.486.214
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	660.657.312	355.563.200
Listrik, Gas dan Air	260.700.153	167.777.100
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan	79.959.281	3.349.532
Perikanan	115.240.272	142.461.056
Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga	7.177.321.083	3.090.882.785
Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	<u>318.334.127.021</u>	<u>303.923.931.801</u>
 Jumlah	 466.870.550.130	 469.103.589.357
Provisi kredit	(3.107.677.689)	(3.605.045.108)
Biaya transaksi	<u>104.886.812</u>	<u>270.147.683</u>
 Jumlah kredit yang diberikan	 463.867.759.253	 465.768.691.932
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.870.203.300)	(32.921.613.833)
 Jumlah bersih	 <u>411.997.555.953</u>	 <u>432.847.078.099</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan jangka waktu

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Sampai dengan 1 tahun	93.160.169.390	73.493.244.770
Lebih dari 1 tahun – sampai dengan 5 tahun	205.368.021.074	293.394.011.065
Lebih dari 5 tahun – sampai dengan 10 tahun	63.614.938.857	72.077.674.431
Lebih dari 10 tahun	<u>104.727.420.809</u>	<u>30.138.659.093</u>
Jumlah	466.870.550.130	469.103.589.357
Provisi kredit	(3.107.677.689)	(3.605.045.108)
Biaya transaksi	<u>104.886.812</u>	<u>270.147.683</u>
Jumlah kredit yang diberikan	463.867.759.253	465.768.691.932
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.870.203.300)	(32.921.613.833)
Jumlah bersih	<u>411.997.555.953</u>	<u>432.847.078.099</u>

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Lancar	343.975.211.865	365.686.017.426
Dalam Perhatian Khusus	50.827.419.597	53.703.471.138
Kurang lancar	4.167.612.860	4.333.803.159
Diragukan	13.235.130.842	6.064.076.429
Macet	<u>54.665.174.966</u>	<u>39.316.221.210</u>
Jumlah	466.870.550.130	469.103.589.357
Provisi kredit	(3.107.677.689)	(3.605.045.108)
Biaya transaksi	<u>104.886.812</u>	<u>270.147.683</u>
Jumlah kredit yang diberikan	463.867.759.253	465.768.691.932
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.870.203.300)	(32.921.613.833)
Jumlah bersih	<u>411.997.555.953</u>	<u>432.847.078.099</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025 %	2024 %
NPL Gross	15,44	10,60
NPL Net	5,68	4,20

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal tahun	32.921.613.833	22.935.066.539
Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	25.644.363.560	12.768.050.274
Penghapusan selama tahun berjalan	(5.336.372.226)	(997.254.500)
Pemulihan	(1.359.401.867)	(1.784.248.480)
Saldo akhir tahun	<u>51.870.203.300</u>	<u>32.921.613.833</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

f. Kredit yang direstrukturisasi

Pada tahun 2025 jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp 100.018.250.042, jenis restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu kredit.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 2.910.895.700 dan Rp 8.908.684.000.
- b. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang terkait dengan kredit BMPK sebesar Rp 3.204.333.723 dan Rp 6.208.684.000.
- c. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan adalah masing -masing sebesar 3 – 36% (2025).
- d. Pendapatan bunga selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 97.476.773.650 dan Rp 79.327.976.224 (lihat Catatan 22).
- e. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

	2025 Rp	2024
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	7.175.453.824	6.917.951.082
Pihak ketiga	14.350.907.647	13.835.902.164

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2025 Rp	2024 Rp
Tanah dan bangunan	<u>7.384.087.384</u>	<u>1.661.860.000</u>

No	Nama Debitur	Tanggal AYDA	Jaminan	Nilai AYDA
1	Jajam Setiawan	28/02/2023	Tanah dan bangunan	1.661.860.000
2	Iwan Ginanjar	28/11/2025	Tanah dan bangunan	213.560.313
3	Arief Rahman	28/11/2025	Tanah dan bangunan	381.598.500
4	Aat Muslihat	28/11/2025	Tanah dan bangunan	266.786.000
5	Dian Kurniawan	28/11/2025	Tanah dan bangunan	690.738.200
6	Atep Warsa	28/11/2025	Tanah dan bangunan	455.881.282
7	Riska Dewi	28/11/2025	Tanah dan bangunan	261.953.635
8	Tedi Kusmayadi	28/11/2025	Tanah dan bangunan	352.083.333
9	Rustandi	29/11/2025	Tanah dan bangunan	198.541.599
10	Mahmud	16/12/2025	Tanah dan bangunan	141.278.186
11	Nurdianti	16/12/2025	Tanah dan bangunan	216.235.311
12	Maryati	17/12/2025	Tanah dan bangunan	499.759.750
13	Kurnia	19/12/2025	Tanah dan bangunan	357.758.773
14	Uep Suhendar	19/12/2025	Tanah dan bangunan	89.316.814
15	Ela Hayati	22/12/2025	Tanah dan bangunan	281.634.300
16	Imas Tati	22/12/2025	Tanah dan bangunan	494.500.000
17	Ona Saepul	24/12/2025	Tanah dan bangunan	559.081.878
18	Tati Suryani	29/12/2025	Tanah dan bangunan	131.337.310
19	Iwan Setiaman	29/12/2025	Tanah dan bangunan	130.182.200
Jumlah				7.384.087.384

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

9. ASET TETAP

	Saldo awal Rp	2 0 2 5 Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	3.714.470.526	-	-	3.714.470.526
Bangunan	17.148.762.003	45.700.000	-	17.194.462.003
Kendaraan	2.382.984.440	388.025.000	-	2.771.009.440
Inventaris kantor	8.225.530.537	826.250.072	-	9.051.780.609
Jumlah	<u>31.471.747.506</u>	<u>1.259.975.072</u>	<u>-</u>	<u>32.731.722.578</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	3.989.188.434	904.968.115	-	4.894.156.549
Kendaraan	1.628.135.864	362.095.912	-	1.990.231.776
Inventaris kantor	5.836.651.782	978.397.810	-	6.815.049.592
Jumlah	<u>11.453.976.080</u>	<u>2.245.461.837</u>	<u>-</u>	<u>13.699.437.917</u>
Nilai buku	<u>20.017.771.426</u>			<u>19.032.284.661</u>

	Saldo awal Rp	2 0 2 4 Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	3.434.470.526	280.000.000	-	3.714.470.526
Bangunan	14.158.679.614	2.990.082.389	-	17.148.762.003
Kendaraan	2.998.471.633	400.199.963	1.015.687.156	2.382.984.440
Inventaris kantor	10.191.295.144	1.360.027.488	3.325.792.095	8.225.530.537
Jumlah	<u>30.782.916.917</u>	<u>5.030.309.840</u>	<u>4.341.479.251</u>	<u>31.471.747.506</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	3.197.791.507	791.396.927	-	3.989.188.434
Kendaraan	2.347.251.011	296.572.009	1.015.687.156	1.628.135.864
Inventaris kantor	8.167.342.684	995.101.193	3.325.792.095	5.836.651.782
Jumlah	<u>13.712.385.202</u>	<u>2.083.070.129</u>	<u>4.341.479.251</u>	<u>11.453.976.080</u>
Nilai buku	<u>17.070.531.715</u>			<u>20.017.771.426</u>

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp2.245.461.837 (2025) dan Rp2.083.070.129 (2024).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

10. ASET TIDAK BERWUJUD

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Program Aplikasi (Software)	1.612.095.580	1.612.095.580
Akumulasi Amortisasi Program Aplikasi (Software)	(1.424.649.588)	(1.277.531.706)
Jumlah	<u>187.445.992</u>	<u>334.563.874</u>

11. ASET LAIN-LAIN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Percetakan	394.754.150	446.549.400
Sewa gedung	180.882.045	225.050.431
PPOB	161.238.848	137.017.786
Iklan	100.304.168	148.302.500
Asuransi	80.006.617	78.083.589
Renovasi	23.369.504	5.312.490
Bunga rekening dana bergulir	-	222.942.242
Subsidi	-	331.293.736
Seragam	-	68.352.000
Uang muka pembelian tanah	-	42.957.079
Lainnya	500.000.000	1.007.447.676
Jumlah	<u>1.440.555.332</u>	<u>2.713.308.929</u>

12. LIABILITAS SEGERA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Kiriman uang masuk	1.275.082.535	1.621.406.562
PPh Pasal 21	954.026.439	679.539.826
Titipan nasabah	400.200.356	457.489.874
PPh Pasal 4 ayat 2 deposito	159.799.850	159.741.097
PPh Pasal 4 ayat 2 tabungan	49.192.420	58.316.335
PPh Pasal 23	4.502.910	4.683.851
PPh Pasal 4 ayat 2 sewa gedung	9.233.180	1.010.960
PPh Pasal 21 atas jasa	3.110.999	660.999
PPh Pasal 4 ayat 2 hadiah	25.000	-
Lain-lain	-	-
Jumlah	<u>2.855.173.687</u>	<u>2.982.849.504</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

13. UTANG BUNGA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Deposito pihak ketiga	427.351.725	414.066.391
Deposito dari bank lain	183.198.258	226.715.096
Pinjaman yang diterima	79.464.391	-
Jumlah	<u>690.014.374</u>	<u>640.781.487</u>

14. SIMPANAN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Tabungan		
Tabungan Kotak Mas	58.236.598.807	59.012.337.518
Tabungan Serbaguna	116.363.161.505	118.327.260.865
Tabungan Simpel	4.109.958.688	3.455.537.538
Tabungan Simpanan Masa Depan	5.021.199.007	5.624.718.633
Tabungan Simapan	85.628.449	168.664.982
Tabungan Simapan Haji	9.785.429	158.725.169
Jumlah	<u>183.826.331.886</u>	<u>186.747.244.705</u>
Deposito berjangka		
Menurut jangka waktu :		
Deposito berjangka 1 bulan	4.591.500.000	5.932.000.000
Deposito berjangka 3 bulan	37.915.370.000	31.716.400.000
Deposito berjangka 6 bulan	24.758.200.000	21.621.500.000
Deposito berjangka 9 bulan	2.387.500.000	1.050.000.000
Deposito berjangka 12 bulan	88.593.200.000	86.451.600.000
Deposito berjangka 24 bulan	6.947.900.000	6.125.700.000
Jumlah	<u>165.193.670.000</u>	<u>152.897.200.000</u>
Jumlah simpanan	<u>349.020.001.886</u>	<u>339.644.444.705</u>

Tingkat suku bunga tabungan rata-rata untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar 0% - 4% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.402.309.204 dan Rp3.887.179.063 (lihat Catatan 24).

Tingkat suku bunga deposito untuk tahun 2025 dan 2024 berkisar antara 2% sampai dengan 6,75% (2025) dan 2% sampai dengan 6,75% (2024). Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp9.540.479.771 dan Rp9.744.580.827 (lihat Catatan 24).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2025 Rp	2024 Rp
PT BPR Cirebon Jabar Perseroda	4.500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Karya Utama Jabar	4.000.000.000	-
PD BPR Subang	3.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Kuningan	3.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Muhadi Setia Budi	2.000.000.000	-
PT BPR Nusumma Jatim	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Garut	2.000.000.000	3.000.000.000
PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Nusa	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Prima Nadi	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia	2.000.000.000	1.800.000.000
Perumda BPR Majalengka	2.000.000.000	1.000.000.000
PD BPR Kabupaten Sumedang	2.000.000.000	500.000.000
PT BPR Bank Sleman Perseroda	2.000.000.000	-
PT BPR Indra Candra (ada tabungan)	1.801.102.964	501.059.787
PT. BPR Permata Dhanawira	1.800.000.000	4.000.000.000
PT BPR Lestari Bali	1.750.000.000	4.000.000.000
PT BPR Ukabima Lestari	1.500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	1.500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)	1.500.000.000	1.000.000.000
PT BPR Urban Bali	1.500.000.000	1.000.000.000
PT BPR Suryajaya Kubutambahan	1.500.000.000	-
PT BPR Lestari Jabar	1.300.000.000	1.750.000.000
Perumda BPR Kota Bandung (ada tabungan)	1.003.332.212	-
PT BPR Lima Padma Mandiri	1.000.000.000	-
PT BPR Suar Artha Dharma	1.000.000.000	-
PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda)	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Dewata Candradana	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda)	1.000.000.000	-
PT BPR Prima Dewata	1.000.000.000	-
PT BPR Kulon Progo	1.000.000.000	-
PD BPR Sumedang	1.000.000.000	500.000.000
PT BPR Artha Niaga Finatama	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Aruna Nirmaladuta	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Dana Nagoya	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Tapa	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Bank Delta Artha (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Sukabumi	1.000.000.000	-
Jumlah dilanjutkan	<u>63.654.435.176</u>	<u>46.051.059.787</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Jumlah lanjutan	63.654.435.176	46.051.059.787
PT BPR Citradana Rahayu	1.000.000.000	-
PT BPR Dassa	1.000.000.000	-
PT BPR Metro Asia Mandiri	750.000.000	500.000.000
PT BPR Jujur Arghadana	750.000.000	-
PT BPR Gitamakmur Utama	750.000.000	-
PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Parahyangan	500.000.000	500.000.000
PT BPR Gamon	500.000.000	500.000.000
PT BPR Angsa Sedanayoga	500.000.000	500.000.000
PT BPR Buana Dana Makmur	500.000.000	500.000.000
PD BPR Sukabumi	500.000.000	-
PT BPR Sari Jaya Sedana	500.000.000	500.000.000
PT BPR Bank Jombang Perseroda	500.000.000	500.000.000
PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)	500.000.000	500.000.000
PT BPR Kota Pasuruan Perseroda	500.000.000	500.000.000
PT BPR Tridarma Putri	500.000.000	1.750.000.000
PT BPR Mulia Yuganta Indonesia	250.000.000	400.000.000
PT BPR Lestari Banten	235.000.000	1.585.000.000
PT BPR Pantura Abadi	500.000.000	-
PT BPR Serang Perseroda	500.000.000	-
PT BPR Vima	500.000.000	-
PT BPR Cianjur Jabar	500.000.000	-
PT BPR Prima Kredit Utama	500.000.000	-
PT BPR Gunadhana Mitrasembada	500.000.000	-
PT BPR Christa Jaya Perdana	500.000.000	-
PT BPR Mandiri Artha Abadi	-	1.000.000.000
Perumda BPR Bank Kota Bogor	-	1.000.000.000
PT BPR Lokadana Sentosa	-	500.000.000
PT BPR Krian Nusantara	-	1.500.000.000
PT BPR Wiradhana Putramas	-	1.000.000.000
PT BPR Tritunggal	-	2.000.000.000
PT BPR Banjar Arthasariguna	-	500.000.000
Perumda BPR Bank Kota Kediri	-	1.000.000.000
PT BPR Tata Artha Sadaya	-	1.000.000.000
PT BPR Markoni Saranajaya	-	1.000.000.000
PT BPR Parasari Sibang	-	1.000.000.000
PT BPR Karimun Sejahtera	-	500.000.000
PT BPR Arthaya Indotama Pusaka	-	500.000.000
Jumlah lanjutan	76.889.435.176	66.786.059.787

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah lanjutan	76.889.435.176	66.786.059.787
PD BPR Astanajapura	-	2.000.000.000
Perumda BPR Bank Kulon Progo	-	2.000.000.000
PT BPR Andalan Daerah	-	2.000.000.000
PT BPR Artha Bali Jaya	-	6.000.000.000
PT BPR Bank Kertiawan	-	2.000.000.000
PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri	-	2.000.000.000
PD BPR Bank Sleman	-	2.000.000.000
Jumlah	76.889.435.176	84.786.059.787

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dalam bentuk deposito, berjangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan perpanjangan otomatis. Tingkat suku bunga deposito dari bank lain berkisar antara 3,0 % sampai dengan 6,75 % (2025) per tahun.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. PERPAJAKAN

a. Taksiran perhitungan pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan per 31 Desember 2025 dan 2024 tarif pajak yang berlaku

	2025 Rp	2024 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>7.263.569.816</u>	<u>6.472.614.013</u>
Perbedaan waktu :		
Imbalan kerja	473.504.066	-
Amortisasi	79.097.049	-
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Sumbangan	505.186.659	355.520.463
Lainnya	201.264.338	257.424.574
Jumlah Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>1.259.052.112</u>	<u>612.945.037</u>
Laba fiskal	<u>8.522.621.928</u>	<u>7.085.559.050</u>
Taksiran Pajak penghasilan badan	<u>1.874.976.840</u>	<u>1.558.822.980</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Utang pajak

	2025 Rp	2024 Rp
Pajak penghasilan badan	1.874.976.840	1.558.822.980
Dikurangi : Pajak dibayar dimuka	<u>(1.589.732.117)</u>	<u>(1.402.356.523)</u>
Pajak Penghasilan pasal 29	285.244.723	156.466.457
Utang pajak lainnya :		
Pajak penghasilan :		
Pasal 25	-	318.571.786
Jumlah	<u>285.244.723</u>	<u>475.038.243</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Tangguhan

	2025		
	1 Januari 2025 Rp	Dikreditkan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Rp	31 Desember 2025 Rp
Aset (liabilitas) pajak tangguhan :			
Liabilitas imbalan kerja	-	104.170.895	104.170.895
Amortisasi aset lain-lain	-	17.401.351	17.401.351
Jumlah	-	121.572.245	121.572.245

c. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

17. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2025 Rp	2024 Rp
PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera	7.894.482.100	10.000.000.000
PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero)	6.049.867.366	6.977.917.437
PT BPR Kirana Indonesia	1.749.999.990	2.749.999.998
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	20.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Delta Artha Perseroda	6.888.888.889	-
PT BPR Jombang Perseroda	2.499.999.996	-
Pinjaman kendaraan	-	20.166.065
Jumlah	45.083.238.341	21.748.083.500
Provisi pinjaman	(49.229.162)	(60.291.665)
Biaya transaksi	(83.208.318)	(6.395.833)
Jumlah	44.950.800.861	21.681.396.002

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

17. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero)

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero), Tbk yang merupakan kredit untuk pembiayaan perumahan KPR, dengan suku bunga 6.5% per tahun. Jangka waktu atas pinjaman tersebut adalah 24 bulan sejak penarikan.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk yang merupakan kredit agunan surat berharga, dengan suku bunga 5.5% per tahun. Jangka waktu atas pinjaman tersebut adalah 12 bulan sejak penarikan.

PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) memperoleh pinjaman dari PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera , dengan suku bunga 6.01% per tahun. Jangka waktu atas pinjaman tersebut adalah 48 bulan sejak penarikan.

PT BPR Kirana Indonesia

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) memperoleh pinjaman dari PT BPR Kirana Indonesia , dengan suku bunga 4.88% per tahun. Jangka waktu atas pinjaman tersebut adalah 36 bulan sejak penarikan.

PT BPR Delta Artha Perseroda

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) memperoleh pinjaman dari PT BPR Delta Artha Perseroda , dengan suku bunga 10.5 % per tahun. Jangka waktu atas pinjaman tersebut adalah 36 bulan sejak penarikan

18. LIABILITAS LAIN-LAIN

	2025 Rp	2024 Rp
Modal Bergulir (LKM)	3.500.000.000	3.500.000.000
Dana CSR	139.888.108	42.474.378
Pendidikan	57.174.700	-
Modal Bergulir Non Permanen Juara Bedas	-	50.000.000.000
Jumlah	<u>3.697.062.808</u>	<u>53.542.474.378</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Berdasarkan SAK EP Bab 28 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk mengakui Kewajiban Imbalan Kerja untuk karyawan memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Standar Akuntansi Keuangan tersebut. Berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas besarnya Kewajiban Imbalan Kerja, dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan. Jumlah liabilitas imbalan kerja yang telah dibentuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek :		
Jamsostek, Asuransi, BPJS	42.577.206	28.521.523
Kewajiban Asuransi BPJS	40.774.123	69.667.099
Dana Pensiun	32.976.049	7.801.357
Jangka panjang lainnya & Pesangon	493.720.747	167.645.517
Imbalan kerja	137.091.437	-
Jumlah	<u>747.139.562</u>	<u>273.635.496</u>

BPR telah mengikutsertakan karyawannya pada program pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Jumlah premi asuransi yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun tersebut adalah sebesar Rp 3.032.668.561

20. MODAL SAHAM

Berdasarkan Persetujuan OJK tentang Penambahan Modal Disetor PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) pada tanggal 28 Agustus 2023, Komposisi kepemilikan modal BPR menjadi sebagai berikut :

	2 0 2 5	
Pemegang saham	Persentase kepemilikan %	Jumlah Rp
Pemerintah Kabupaten Bandung	99,49	52.711.561.000
Koperasi Karyawan PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)	0,51	268.439.000
Jumlah	<u>100</u>	<u>52.980.000.000</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

20. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pemegang saham	2024	
	Persentase kepemilikan %	Jumlah Rp
Pemerintah Kabupaten Bandung	99,49	52.711.561.000
Koperasi Karyawan PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)	0,51	268.439.000
Jumlah	100	52.980.000.000

21. CADANGAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diaktakan oleh notaris Richo Layer, S.H., M.Kn. No. 05 tanggal 06 Mei 2025, BPR telah menambah cadangan sebesar Rp 982.758.207 sehingga saldo cadangan pada 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp 12.912.092.014

22. DIVIDEN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diaktakan oleh notaris Richo Layer, S.H., M.Kn. No. 79 tanggal 06 Mei 2025, BPR telah membagikan dividen yang berasal dari laba tahun 2024 sebesar Rp 2.702.585.068

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

23. PENDAPATAN BUNGA

	2025 Rp	2024 Rp
Penempatan pada bank lain :		
Giro	39.848.575	152.586.718
Tabungan	232.319.073	285.973.159
Deposito	2.394.674.300	3.686.805.207
Jumlah	<u>2.666.841.948</u>	<u>4.125.365.084</u>
Pihak ketiga non bank :		
Kredit Yang Diberikan	70.910.438.461	70.534.565.542
Kredit Program	270.091.074	84.580.460
Jumlah	<u>71.180.529.535</u>	<u>70.619.146.002</u>
Bunga Flat to EIR	<u>20.753.604.993</u>	<u>-</u>
Jumlah pendapatan bunga	<u>94.600.976.476</u>	<u>74.744.511.086</u>
Pendapatan provisi – Provisi kredit :		
Kredit Umum	3.208.777.182	4.904.589.751
Kredit Program	7.401.450	8.333.345
Jumlah pendapatan provisi	<u>3.216.178.632</u>	<u>4.912.923.096</u>
Biaya transaksi	<u>(340.225.244)</u>	<u>(329.457.958)</u>
Jumlah	<u>97.476.929.864</u>	<u>79.327.976.224</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

24. BEBAN BUNGA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Bunga bank lain :		
Bunga simpanan dari bank lain	5.610.490.084	5.953.581.231
Bunga pinjaman dari bank lain	2.314.823.837	345.113.230
Biaya transaksi kepada bank lain	12.501.368	31.171.664
 Jumlah bunga bank lain	<u>7.937.815.289</u>	<u>6.329.866.125</u>
 Bunga simpanan :		
Deposito berjangka	9.540.479.771	9.744.580.827
Tabungan	3.402.309.204	3.887.179.063
 Jumlah simpanan	<u>12.942.788.975</u>	<u>13.631.759.890</u>
 Bunga pihak ketiga bukan bank	515.269.661	938.160.502
Lainnya	<u>824.487.387</u>	<u>805.454.370</u>
 Jumlah	<u>22.220.361.312</u>	<u>21.705.240.887</u>

25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Kelebihan penyisihan kerugian penurunan nilai	5.336.372.226	2.353.231.140
Subsidi bunga Juara bedas	2.464.571.507	1.680.576.448
Penalty Kredit	2.400.197.105	2.800.374.096
Administrasi Pemeliharaan Rekening	2.245.191.919	2.542.867.433
Administrasi/TU Kredit	1.862.461.898	2.395.560.637
Pokok Debius	429.731.895	654.866.155
Fee Asuransi	226.539.647	1.877.441
Payment Poin	186.523.967	58.857.271
Penalty Deposito	54.576.000	43.459.000
Administrasi Penutupan Rekening	47.138.305	57.151.962
Denda	19.089.798	29.190.413
Bunga Debius	16.739.431	17.710.735
Administrasi Penggantian Buku Tabungan	3.534.523	3.664.320
Selisih Lebih Kas	272.007	265.908
Lainnya	16.780.500	10.296.000
 Jumlah	<u>15.309.720.727</u>	<u>12.649.948.959</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

26. KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	25.644.363.560	12.768.050.274
Kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	855.683.695	252.528.746
Jumlah	<u>26.500.047.255</u>	<u>13.020.579.020</u>

27. BEBAN PEMASARAN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Hadiah	250.068.933	243.412.102
Iklan	409.435.232	800.791.600
Jumlah	<u>659.504.165</u>	<u>1.044.203.702</u>

28. BEBAN TENAGA KERJA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Gaji dan tunjangan	18.601.050.800	18.201.551.680
Insentif, THR, dan Gaji ke 13	4.311.300.428	2.088.273.263
Uang makan dan transportasi	1.278.232.000	1.322.637.000
Pendidikan	928.548.000	1.040.670.900
Pesangon	2.244.143.860	825.000.000
DPLK	476.262.334	477.023.015
Uang lembur	146.903.700	228.049.000
Jasa pengabdian	59.581.305	71.150.475
Imbalan kerja	137.091.437	—
Jumlah	<u>28.183.113.864</u>	<u>24.254.355.333</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

29. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2025 Rp	2024 Rp
Penyedia tenaga kerja	8.058.932.283	7.593.208.142
Sewa	4.093.895.768	4.054.970.098
Penyusutan	2.245.461.837	2.083.070.129
Kecurangan	1.617.397.180	-
Premi asuransi	1.540.262.453	1.566.625.735
BBM operasional	1.223.070.453	1.411.315.935
Rumah tangga kantor	1.279.312.914	1.169.493.687
Penagihan kredit	1.041.878.531	896.894.790
Barang cetakan	723.042.250	833.449.206
Fee agen deposito	709.450.939	623.852.638
Seragam	562.090.000	592.875.000
Pemeliharaan dan perbaikan	579.582.696	560.713.009
Telepon	490.462.246	470.946.631
Listrik	316.904.447	320.596.140
ATK	300.310.839	313.697.015
Perjalanan dinas	361.624.200	306.303.100
Operasional lainnya	203.932.907	254.587.700
Parkir dan tol	171.125.900	187.110.800
Pembinaan simpanan	161.653.136	160.881.006
Keamanan, ketertiban, dan kebersihan	134.116.500	150.389.832
Amortisasi aset tidak berwujud	147.117.882	148.680.375
Konsultan	236.715.999	133.982.501
Peralatan kantor	158.892.314	132.399.375
Materai	30.684.100	98.241.200
Notaris	48.250.000	82.704.679
Fotokopi dan penjiilidan	32.468.268	46.179.955
Pajak	36.100.330	43.596.204
Cinderamata	12.500.000	32.771.000
Air	21.647.950	26.316.952
Koran dan majalah	8.698.000	12.849.500
Pengiriman surat	5.815.400	5.929.300
Lainnya	454.042.800	449.979.300
Jumlah	27.007.440.522	24.764.610.934

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

30. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Lainnya	-	101.864.982
Jumlah	<u>-</u>	<u>101.864.982</u>

31. BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Sumbangan	505.186.659	355.520.463
Denda	5.605.141	25.431.671
Pajak	43.356.805	2.241.088
Lainnya	398.465.052	434.993.055
Jumlah	<u>952.613.657</u>	<u>818.186.277</u>

32. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Aset Produktif yang dihapus buku	40.503.147.758	39.283.288.169
Bunga Kredit Dalam Penyelesaian	24.724.453.084	17.795.588.475
Jumlah	<u>65.227.600.842</u>	<u>57.078.876.644</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

33. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

Pihak yang berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam kegiatan usaha normal, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.204.333.723 dan Rp8.908.684.000.
- b. Deposito berjangka dari pihak yang berelasi Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.000.000.000 dan Rp2.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar Rp935.461.929 dan Rp204.956.533.

34. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, simpanan pada Bank konvensional yang dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo yang tercatat pada pembukuan Bank pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. Saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah Penyimpan pada satu Bank paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei dan September. Dalam hal diperlukan, LPS dapat menetapkan tingkat bunga Penjaminan di luar waktu yang ditentukan. LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perekonomian Rakyat periode 1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026 adalah sebesar 6%. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Beban premi penjaminan yang dibayar selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp824.487.387 dan Rp805.454.370.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 12%. *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 20,58% dan 18,76%.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

	2025 Rp	2024 Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)		
1. ASET NERACA		
1.1. Kas	—	—
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	—	—
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit; dan	—	—
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	—	—
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah pengawasan BPR.	—	—
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	20.300.600.156	21.231.375.102
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	—	—
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	—	—
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	29.850.511.856	26.831.705.457
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	—	—
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	5.951.162.599	5.316.392.252
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko Yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	19.943.871.033	23.791.599.532
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	20.902.935.896	32.115.405.225
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	5.710.741.037	9.045.214.638
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	206.885.479.553	210.451.114.902
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	13.265.057.328	11.552.120.952
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	19.219.730.654	20.352.335.301
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	—	—
1.19. Aset lainnya selain tersebut diatas	6.593.041.031	8.133.479.214
Jumlah ATMR	348.623.131.142	368.820.742.575

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
I. MODAL		
1.1. Modal Inti Utama		
1.1.1. Modal disetor	52.980.000.000	52.980.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal		
1.1.2.1. Agio	-	-
1.1.2.2. Dana setoran modal	-	-
1.1.2.3. Modal sumbangan	-	-
1.1.2.4. Cadangan umum	8.337.006.275	7.845.627.172
1.1.2.5. Cadangan tujuan	4.575.085.739	4.083.706.636
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	-	-
1.1.2.7. Rugi tahun-tahun lalu	-	-
1.1.2.8. Laba tahun berjalan	5.510.165.220	2.456.895.517
1.1.2.9. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	-	-
1.1.2.10. <i>Goodwill</i>	-	-
1.1.2.11. Disagio	-	-
1.1.2.12. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1(satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	(1.107.613.108)	(249.279.000)
1.1.2.13. -/- Selisih kurang antara CKPN dan PPKA	-	-
Jumlah modal inti utama	<u>70.294.644.127</u>	<u>67.116.950.325</u>
1.2 Modal Inti Tambahan	-	-
1.3 Modal Inti Tambahan	-	-
2. Modal Pelengkap		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-	-
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	-	-
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1,25% dari ATMR)	1.459.894.109	2.062.560.495
Jumlah modal pelengkap	<u>1.459.894.109</u>	<u>2.062.560.495</u>
Jumlah modal	<u>71.754.538.236</u>	<u>69.179.510.820</u>
II. Modal Minimum (12% dari ATMR)	41.834.775.737	44.194.239.142
III. Jumlah Kelebihan (Kekurangan) modal	29.919.762.498	24.985.271.678
IV. Rasio Modal (CAR) (Jumlah modal / ATMR) x 100%	20,58%	18,76%
Persentase Modal Inti terhadap ATMR		
V. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa : 10% x Jumlah modal	7.175.453.824	6.917.951.082
Pihak ketiga : 20% x Jumlah modal	14.350.907.647	13.835.902.164

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

36. INFORMASI LAINNYA

	2 0 2 5	2 0 2 4
Rasio	%	%
I. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,58	18,76
II. Aktiva Produktif		
Aktiva produktif yang diklasifikasikan	11,75	9,86
Pemenuhan PPAP	100	100
Non-Performing Loan (NPL) Gross	15,44	10,60
Non-Performing Loan (NPL) Net	5,68	4,20
III. Rentabilitas		
Return On Assets (ROA)	1,30	1,16
Beban Operasi terhadap pendapatan (BOPO)	92,72	92,18
IV. Likuiditas		
Loan Deposit Rasio (LDR)	132,91	137,13
Cash Rasio	15,00	10,39

37. MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Risiko ini melekat pada aktivitas perkreditan, khususnya pada kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen kredit dan aktivitas pendanaan. Likuiditas BPR mempunyai peran yang sangat penting karena apabila BPR gagal dalam mengelola likuiditasnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

37. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Langkah yang diambil oleh BPR sehubungan dengan *mismatch* aktiva dan kewajiban moneter yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan, 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan (Catatan 14) adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyimpan dana dan melakukan promosi melalui promosi penjualan dalam bentuk pemberian hadiah serta melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing. Sedangkan untuk penyaluran dana, BPR melakukan evaluasi terhadap persyaratan kredit yang lebih cepat, tepat dan akurat serta melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh BPR antara lain dengan cara :

1. Membuat dan memantau posisi Risiko di seluruh aktivitas fungsional bank secara keseluruhan (*composite*) berdasarkan jenis Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dalam rangka melakukan mitigasi risiko pada ruang lingkup kegiatan bank.
3. Mendesain perangkat (*tools*) yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko
4. Membuat, menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direksi.
5. Melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran BMPK dan memberikan *Early Warning* kepada Direksi dimana terdapat kondisi telah mendekati limit BMPK.
6. Melakukan mitigasi risiko kredit dengan pihak asuransi.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar BPR.

Seluruh aktivitas kegiatan BPR senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 4 (empat) permasalahan tersebut di atas, sehingga dengan sendirinya potensial terjadinya risiko operasional memiliki kesempatan lebih tinggi dibanding dengan risiko-risiko yang lain.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing bagian bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

37. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

BPR melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sebagai berikut :

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan operasional.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.

38. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan No. 08/POJK.08/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan dan prosedur.
- c. Pengendalian intern.
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia.

BPR wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) telah menyampaikan pedoman pelaksanaan program APU & PPT.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

39. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada 17 Maret 2026.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	Sabar dan Rekan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT BPR Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : 2025

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT BPR Kerta Raharja Perseroda menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahunan ini. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
2. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2025 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Darwansyah dari Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan.
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2025 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
4. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2025 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Soreang, 30 April 2026

PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA



RONI MARYONO
Direktur Operasional



EVI YULIANTI
Direktur Kepatuhan



AEP HENDAR CAHYAD
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	022-5893334
Nomor Telepon	022-5893334
Penjelasan Umum	PT BPR Kerta Raharja Perseroda telah memiliki Governance Structure yang baik dalam lingkup penerapan tata kelola baik dari segi komposisi dan pemenuhan persyaratan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi juga telah ditunjang dengan adanya pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Lebih lanjut, PT BPR Kerta Raharja Perseroda juga secara aktif melakukan tindak lanjut atas kewajiban penyelarasan organisasi dalam rangka penerapan kewajiban Strategi Anti Fraud, Pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, transparansi laporan keuangan dan seluruh ketentuan lainnya berkaitan dengan penerapan tata kelola di BPR berpedoman kepada POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai belum terpenuhi secara keseluruhan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR sebagian besar tergolong terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa penguatan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara baik. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai terpenuhi secara baik. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik.9.Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai terpenuhi secara baik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR BPR tergolong terpenuhi secara baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
Keterangan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rekomendasi kepada Direksi		
Keterangan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
01	0	0	0	0
02	0	0	0	0
03	0	0	0	0

0

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentaase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Dewan Komisaris				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentaase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	3	666.102.500	3	558.037.500
Tunjangan	3	1.049.736.700	3	66.949.800
Tantiem	3	93.103.410	3	23.415.647
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	3	450.106.000	3	128.622.900
Total Remunerasi		2.259.048.610		777.025.847
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	0	0	0	0
Transportasi	3	376.620.420	3	185.096.232
Asuransi Kesehatan	3	30.785.907	3	3.013.399
Fasilitas Lain-Lainnya	3	28.380.000	3	18.012.000
Total Fasilitas Lain		435.786.327		206.121.631
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		2.694.834.937		983.147.478

0

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	704,30
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	128,26
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	130,78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	282,62
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	449,83

0

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
17-01-2025	13	Rapat evaluasi kekurangan CKPN
23-01-2025	10	Rapat penanganan kredit bermasalah
16-06-2025	8	Rapat evaluasi pemenuhan kekosongan direksi dan komisaris
23-06-2025	6	Rapat evaluasi kinerja kepatuhan
26-06-2025	7	Rapat evaluasi TKS BPR
02-07-2025	6	Rapat evaluasi kredit PT BDS
14-07-2025	7	Rapat evaluassi NPL
21-07-2025	13	Rapat terkait struktural yang ada di BPR
02-09-2025	9	Rapat koordinasi atas hasil RUPS tanggal 25 Agustus 2025
19-09-2025	6	Rapat koordinasi pelaksanaan open seleksi struktural BPT
06-10-2025	5	Rapat internal Dewan Komisaris terkait tugas tanggung jawab dan wewengan komisaris berdasarkan POJK
15-10-2025	5	Rapat internal dewan komisaris terkait pembentukan komite
05-11-2025	12	Rapat penangan isu pemberitaan BPR
11-11-2025	13	Rapat evaluasi RBB 2025 dan APU PPT
18-11-2025	13	Rapat Evaluasi dengan Direktur Operasional berserta jajaran
26-11-2025	12	Evaluasi eksposes dan pembahasan RBB Tahun 2026
01-12-2025	5	Rapat mekanisme pembentukan komite dewan komisaris
04-12-2025	9	Tindaklanjut bermasalahan debitur a.n Owi
04-12-2025	15	Rapat evaluasi tim skk

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
13-12-2025	14	Rapat pembahasan RKA Tahun 2026

0

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	

0

Form E.08.00

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	3	3	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	1	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

0

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

0

Form E.10.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
10-09-2025	01	Pembangunan Rutilahu Program P2WKSS sebanyak 5 unit rumah	Warga desa Neglasari Ibun- Majalaya	50.000.000

0

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA

Posisi Laporan : 2025

Berikut ini adalah lampiran dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan tahunan:

1. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2025

Soreang, 30 April 2026

PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA

DIREKSI


RONI MARYONO
Direktur Operasional




EVI YULIANTI
Direktur Kepatuhan


AEP HENDAR CAHYAD
Direktur Utama

KOMISARIS


IDAT MUSTARI SUTARYA
Komisaris Utama




FIRMAN BUDIAWAN
Komisaris

Laporan ini disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR 2025

PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jln. Soreang No. 15 Kabupaten Bandung dan Jln. Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung	
Nomor Telepon	022-5893334	
Penjelasan Umum	PT BPR Kerta Raharja Perseroda telah memiliki <i>Governance Structure</i> yang baik dalam lingkup penerapan tata kelola baik dari segi komposisi dan pemenuhan persyaratan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi juga telah ditunjang dengan adanya pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Lebih lanjut, PT BPR Kerta Raharja Perseroda juga secara aktif melakukan tindak lanjut atas kewajiban penyelarasan organisasi dalam rangka penerapan kewajiban Strategi Anti Fraud, Pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, transparansi laporan keuangan dan seluruh ketentuan lainnya berkaitan dengan penerapan tata kelola di BPR berpedoman kepada POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)	
Penjelasan Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai belum terpenuhi secara keseluruhan. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR sebagian besar tergolong terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa penguatan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. 5. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik. 6. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara baik. 7. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai terpenuhi secara baik. 8. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara baik. 9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai terpenuhi secara baik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR BPR tergolong terpenuhi secara baik.	

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	NIK	:	3204351305650003
	Nama	:	Ir. H. Aep Hendar Cahyad, M.H
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR, Menentukan Kebijakan pelaksanaan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan, Bertanggung jawab dan mengurus Aset perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan, Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank/perusahaan dan membawa visi dan misi perusahaan pada masyarakat umum dengan melakukan fungsi humas, Menyusun Rencana Bisnis Bank setiap tahun, bersama – sama dengan stakeholder dan anggota Dewan Komisaris, Mengadakan perubahan – perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank, Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang, Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan, Menandatangani surat – surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota direksi atau dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada, Menandatangani surat keputusan direksi bersama direktur dalam kebijakan perusahaan, gaji, promosi, mutasi, dan penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, Membina hubungan dengan para pejabat Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah agar tercipta kerjasama dan bimbingan instansi Pembina tersebut, Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya kepada bank, Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana bisnis bank yang telah disetujui oleh dewan komisaris, Menandatangani laporan – laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak – pihak ekstern lainnya.
2.	NIK	:	3204380701800003
	Nama	:	Roni Maryono, S.E
	Jabatan	:	Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Bertanggung jawab atas penyusunan garis – garis kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan dan umum serta pemasaran dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank, Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan bank secara periodik dan

	berkesinambungan, Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban Rencana Bisnis Bank, Bersama – sama dengan Direktur Utama menandatangani persetujuan kredit, Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan, mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan – kegiatan pada setiap Divisi dan Bagian, Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja, Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank, Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan, Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi, Menyelenggarakan dan mempersiapkan laporan untuk rapat – rapat Direksi, Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya – biaya operasional, Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sampai ke unit terbawah, Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Operasional.
3.	NIK : 3204135007780004
	Nama : Evi Yulianti, S.T
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : Merumuskan dan mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank, Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan dan Manajemen Risiko yang akan ditetapkan oleh Direksi, Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang2 yg berlaku, Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank dan Risiko – Risiko lain yang menjadi cakupan BPR, Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR untuk dilaporkan ke OJK, Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:
1.	

2.	
3.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	NIK	:	327322240369003
	Nama	:	Drs.H.Idat Mustari Sutarya, S.H., M.H
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR Kerta Raharja Perseroda serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini, Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha PT BPR Kerta Raharja Perseroda dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	NIK	:	320437140290002
	Nama	:	Firman Budiawan, S.H., M.H
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha PT BPR Kerta Raharja Perseroda pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris itu sendiri, Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal diantaranya Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
	Rekomendasi kepada Direksi:		
	1.		
	2.		
	3.		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
2.	Jumlah Rapat :
	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
3.	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
4.	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
	Komite Manajemen Risiko
5.	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
	Komite Lainnya

	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite				Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya
1.								Ya/Tdk
2.								
3.								

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

--	--	--	--	--	--

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

2. **Keperwakilan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Dewan Komisaris	
				Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	666.102.500	2	558.037.500
2.	Tunjangan	3	1.049.736.700	2	66.949.800
3.	Tantem	3	93.103.410	2	30.606.230
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya	3	450.106.000	2	128.622.900
	Total Remunerasi		2.259.048.610		784.216.430
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi	3	376.620.420	2	185.096.232
3.	Asuransi Kesehatan	3	30.785.907	2	3.013.399
4.	Fasilitas Lainnya	3	28.380.000	2	18.012.000
	Total Fasilitas Lainnya		435.786.327		195.021.631
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		2.694.834.937		843.424.578

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan		Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	704,30	a/b
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	128,26	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	130,78	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	282,62	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	449,83	

1

1

“f

“f

K

K

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	10/09/2025	Kegiatan Sosial	Pembangunan Rutilahu Program P2WKSS sebanyak 5 unit rumah	Warga desa Neglasari Ibun- Majalaya		50.000.000
2	23/3/2026	Kegiatan Sosial	Pembangunan Rutilahu Program DPMD untuk warga Pangalengan	Agus Setiawan KP Babakan lapang Rt 004/006 Banjarasi - pangalengan	'3204141508750004	15.000.000
3	23/3/2026	Kegiatan Sosial	Pembangunan Rutilahu Program DPMD untuk warga Pangalengan	Eti KP. Babakan Kanaga Rt005/007	'3204156009510003	15.000.000
4	26/3/2026	Kegiatan Sosial	Dana CSR Pengembangan Sarana dan Prasarana yayasan	Yayasan YASINA Jln Sukamenak no 183		10.000.000
5	27/3/2026	Kegiatan Sosial	Dana CSR Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah Darul ilmi	Jalan Terusan Cikancung Desa Pananjung		10.000.000
6	10/09/2025	Kegiatan Sosial	Pembangunan Rutilahu Program P2WKSS sebanyak 5 unit rumah	Warga desa Neglasari Ibun- Majalaya		50.000.000

Soreang, April 2026

PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA

DIREKSI



RONI MARYONO

Direktur Operasional



Bank Kerta Raharja
PT BANK KERTARAHAJIA PERSERODA
Negeri Pura Negeri Operasional



EVI YULIANTI

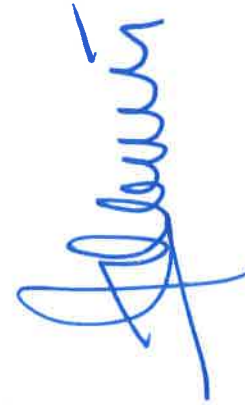
Direktur Kepatuhan



AEP HENDAR CAHYAD

Direktur Utama

KOMISARIS



IDAT MUSTARI SUTARYA

Komisaris Utama



Bank Kerta Raharja
PT BANK KERTARAHAJIA PERSERODA
Negeri Pura Negeri Operasional



FIRMAN BUDIAWAN

Komisaris